

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA
MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI UPT DINAS
PENDIDIKAN KECAMATAN LABUAN
KABUPATEN PANDEGLANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ilmu Sosial Pada Kosentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



Oleh :

SRIDA SUPRIYATNA

Nim : 6661083071

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, AGUSTUS 2015**

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : SRIDA SUPRIYATNA
NIM : 66611083071
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN LABUAN KABUPATEN PANDEGLANG

Serang, 18 Agustus 2015
Proposal Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Disajikan

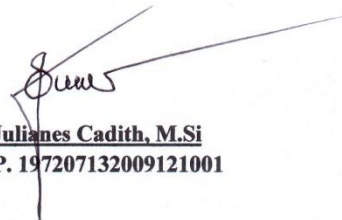
Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Riny Handayani, S.Si, M.Si
NIP. 197601062006042007



Julianes Cadith, M.Si
NIP. 197207132009121001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sifari, S.Sos, M.Si
NIP. 19710804200501002

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Srida Supriatna
NIM : 6661083071
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN
SEKOLAH DASAR (BSM-SD) DI UPT DINAS
PENDIDIKAN KECAMATA LABUAN KABUPATEN
PANDEGLANG**

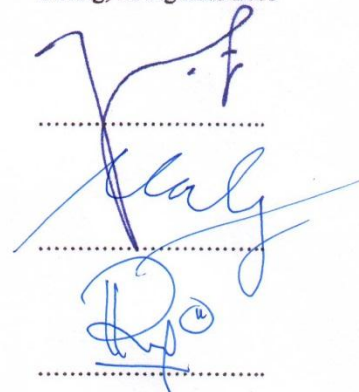
Skripsi ini telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang
, tanggal 8 Juli 2015 dan dinyatakan LULUS .

Serang, 18 Agustus 2015

Ketua Penguji
(Ipah Ema Jumiati, M.Si)
NIP. 197501312005012004

Anggota :
(Maulana Yusuf, M.Si)
NIP. 197603192005011004

Anggota :
(Riny Handayani, M.Si)
NIP. 197601062006042007



Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. AGUS SJAFARI, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Prodi Administrasi Negara
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

RAHMAWATI, M.Si
NIP. 197905252005012001

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRIDA SUPRIYATNA
NIM : 66611083071
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 09 Juli 1990
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang” ini merupakan hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang telah dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini mengandung unsur plagiat , maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Pandeglang, Agustus 2015



SRIDA SUPRIYATNA
Nim : 66611083071

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

MOTO



“Kurangny Kemampuan Bukan Alasan
Untuk Keberhasilan,
Kesungguhan Penuh Semangat
Adalah Modal Keberhasilan”

By: K'yoet Adnan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRAK

Srida Supriatna. NIM.083071. Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Riny Handayani, S.Si, M.Si, Pembimbing II Julianes Cadith, M.Si.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, BSM-SD

Salah satu rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku. Salah satu kebijakan untuk membantu masyarakat miskin dibidang pendidikan adalah program beasiswa bagi siswa miskin atau yang lebih dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implemetasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik deskriptif, dimana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang mendapatkan bantuan dalam Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 2125 orang. Perhitungan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 5 persen, maka sampel yang diperoleh adalah 96. Instrumen dalam penelitian ini diperoleh dari teori Edaward III yang memuat 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Teori Edward III digunakan karena dianggap paling tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam mengumpulkan data dengan cara angket/kuesioner, observasi, studi literature dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Probability sampling dengan tipe Proportional Random Sampling. Untuk menganalis data menggunakan uji t (test) satu sampel dengan uji pihak kanan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tingkat Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($5.795 > 1.664$), maka pelaksanaan program BSM-SD diperoleh sebesar 64.75 persen melebihi angka yang penulis hipotesiskan yaitu sebesar 60 persen.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ABSTRACT

Srida Supriatna. NIM. 083071. Poor Students Assistance Program Implementation Elementary School (BSM-SD) in the District Education Office Unit Labuan Pandeglang. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University. Supervisor I Riny Handayani, S.Si, M.Si, Supervisor II Julianes Cadith, M.Si.

Keywords: Public Policy Implementation, BSM-SD

One of the low participation in education, especially on the poor is the high cost of education both direct and indirect costs. Direct costs include school fees, books, uniforms and stationery, while indirect costs include transportation costs, courses, pocket money. One of the policies to help the poor in education is a scholarship program for poor students, or better known as a Poor Student Aid (BSM). The aim of this study is to investigate the implementation of the program Help Poor Students Elementary School (BSM-SD) in the District Education Office UPT Labuan Pandeglang. The method used is quantitative descriptive technique, where the polulasi in this study were the parents of students who receive assistance in the Student Assistance Program Miskin Primary School (BSM-SD) in the District Education Office UPT Labuan Pandeglang totaling 2125 people. Sample calculation using the formula Slovin with an error rate of 5 percent, then the samples obtained is 96. The instrument in this study were obtained from the theory Edaward III which includes four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Theory Edward III is used because it is considered the most appropriate to answer the formulation problems. In collecting data by questionnaire / questionnaire, observation, literature study and documentation. The sampling technique used is the type of sampling Probability Proportional Random Sampling. To analyze the data using the t test (test) the test sample with the right party. Research results obtained show that the level of implementation of Poor Students Assistance Program Elementary School (BSM-SD) in the District Education Office Unit Labuan Pandeglang has gone well. Based on the calculation results obtained t greater than t table ($5795 > 1664$), the implementation of BSM-SD program obtained by 64.75 percent over the authors hypothesize that figure by 60 percent.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... segala puji hanya milik Allah SWT, hanya kata itulah yang terindah dan pantas peneliti panjatkan kehadirat-Nya, atas segala karunia dan keberkahannya yang telah dilimpahkan kepada peneliti. sehingga penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berada dijalan kebenaran.

Hasil penelitian yang dinamakan skripsi ini, diajukan untuk memenuhi salah satu tugas syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang”**.

Hasi penelitian ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak, yang selalu mendukung penelitian secara moril maupun materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

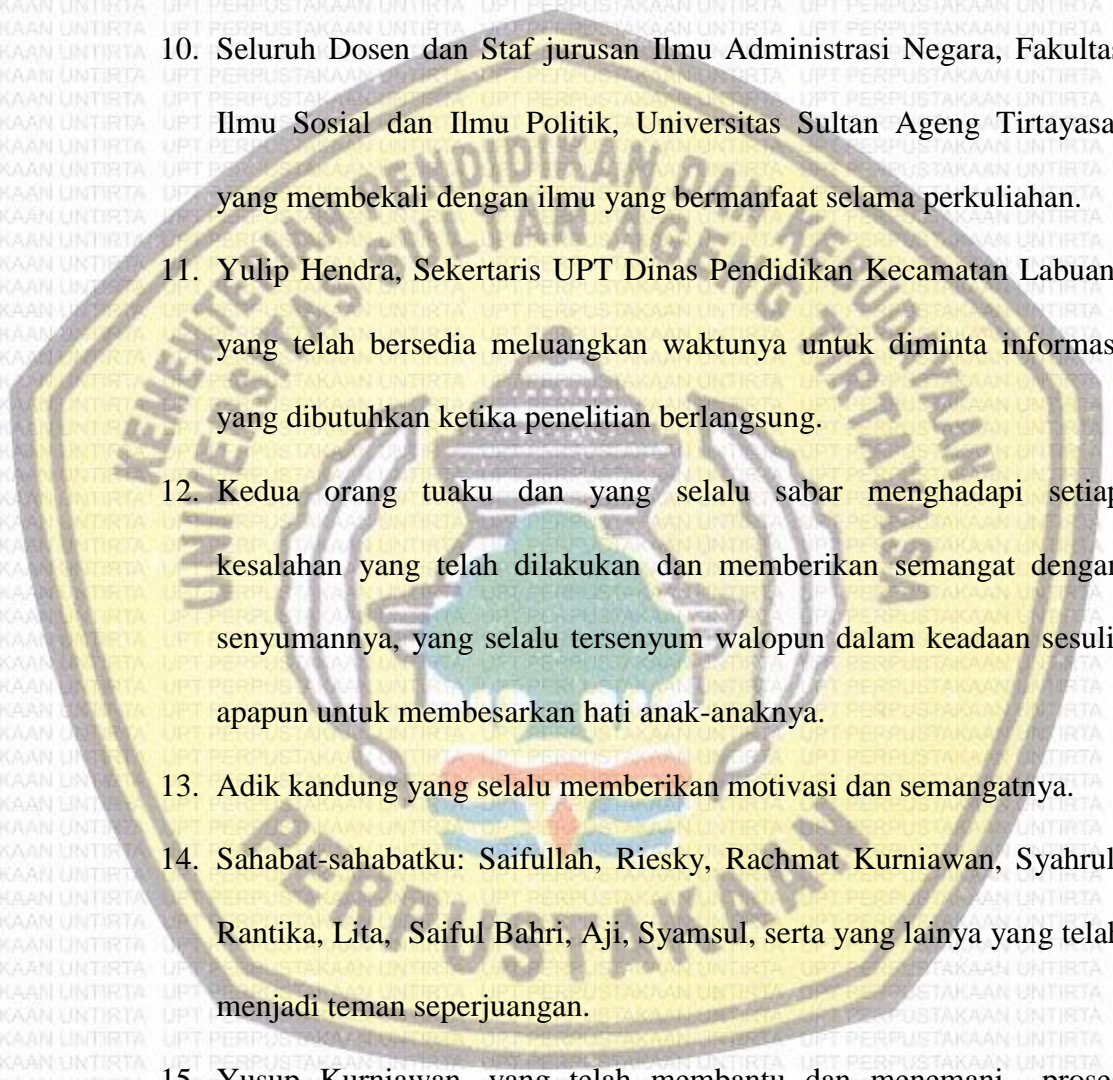
- 
- The logo of Universitas Sultan Ageng Tirtayasa is a circular emblem. It features a central green shield with a white crescent and star, and a red and white striped banner below it. The shield is flanked by two white wings. The emblem is set against a yellow background with a dark border. The text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' is written in a semi-circle at the top, and 'UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA' is written in a semi-circle at the bottom.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 4. Mia Dwianna, Widyaningtyas, M.Ikom, Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 5. Gandung Ismanto, M.Si, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 6. Rahmawati, M.Si, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 7. Ipah Ema Jumiati, M.Si, Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
 8. Riny Handayani, M.Si, Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. serta sebagai Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing penelitian skripsi ini dan berkenan untuk memberikan masukan serta motivasi kepada peneliti ketika menghadapi kesulitan saat mengerjakan penelitian ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
9. Juliannes Cadith, M,Si, Dosen Pembimbing II skripsi yang selalu memberikan saran dan kritiknya serta sangat teliti dalam memeriksa setiap detil kealpaan dan penyusunan penelitian ini.
 10. Seluruh Dosen dan Staf jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. yang membekali dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
 11. Yulip Hendra, Sekertaris UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diminta informasi yang dibutuhkan ketika penelitian berlangsung.
 12. Kedua orang tuaku dan yang selalu sabar menghadapi setiap kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan semangat dengan senyumannya, yang selalu tersenyum walopun dalam keadaan sesulit apapun untuk membesarkan hati anak-anaknya.
 13. Adik kandung yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.
 14. Sahabat-sahabatku: Saifullah, Riesky, Rachmat Kurniawan, Syahrul, Rantika, Lita, Saiful Bahri, Aji, Syamsul, serta yang lainnya yang telah menjadi teman seperjuangan.
 15. Yusup Kurniawan, yang telah membantu dan menemani proses peyebaran kuesioner di Kecamatan Labuan, sehingga semua kuesioner dapat terisi dan terselesaikan.
 16. Yayan, dan Dewi, yang selalu memperingatkan saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

17. Novy Yanty yang telah menjadi sumber semangat tambahan ketika rasa malas dan jenuh menghinggapi dalam proses penyelesaian skripsi.
18. Semua pihak yang telah membantu peneliti hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa karya ini lebih dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif, sehingga peneliti dapat membuat karya yang lebih baik dimasa yang akan datang. Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua amiin.

Serang, 18 Agustus 2015

Peneliti

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Kebijakan Publik.....	16

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	25
2.1.3 Pengertian kemiskinan	36
2.1.4 Bantuan Siswa Miskin (BSM)	37
2.2 Penelitian Terdahulu	44
2.3 Kerangka Berpikir.....	49
2.4 Hipotesis Penelitian.....	51
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	53
3.2 Fokus Penelitian.....	54
3.3 Lokasi Penelitian.....	54
3.4 Variabel Penelitian.....	54
3.5 Instrumen Penelitian.....	58
3.6 Populasi Dan Sampel.....	62
3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	72
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kecamatan Labuan	72
4.2 Deskripsi Data	79
4.2.1 Identitas Responden.....	79
4.2.2 Karakteristik Responden	79

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4.2.3 Jenis Kelamin	79
4.2.4 Tingkat Usia Responden.....	80
4.2.5 Tingkat Pendidikan.....	82
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik	83
4.3.1 Uji Validitas.....	83
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	85
4.4 Analisis data	86
4.4.1 Komunikasi.....	87
4.4.2 Sumberdaya	91
4.4.3 Disposisi	97
4.4.4 Struktur Birokrasi	101
4.5 Pengujian Hipotesis	108
4.6 Interpretasi Data	112
4.7 Pembahasan	113

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR TABEL

Halaman

1.6 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2012-2014	3
1.7 APM Dan APK 2013-2014.....	4
1.8 Besarnya Dana BSM Di Provinsi Banten.....	10
1.9 Jumlah Siswa Yang Mendapatkan BSM	10
3.1 Operasional Variabel.....	57
3.2 Skala Likert	58
3.3 Jumlah Siswa Yang Mendapatkan BSM.....	63
3.4 Perhitungan Sampel Menurut Proporsional	65
3.5 Jadwal Penelitian.....	71
4.1 Hasil Uji Validitas.....	84
4.2 Hasil Uji Reabilitas	85
4.3 Indikator Skor Hasil Penelitian	113
4.4 Prosentase Hasil Perhitungan Perindikator	118

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan	17
2.2 Kerangka Berpikir	51
4.1 Kurva Penerimaan Dan Penolakan Hipotesis	17



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU otonomi daerah, UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004), telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi dirasa sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan merupakan sebuah keharusan jika menginginkan pendidikan Indonesia yang maju dan berkualitas. Bentuk otonomi dalam pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya. Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. (Hasbullah, 2006:65)

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya adalah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Biaya pendidikan untuk jenjang menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 : 1)

Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin ke jenjang yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke jenjang SMA/SMK. Selain itu, Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh pemerintah bagi masyarakat keluarga miskin antara lain : (1) kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan tersebut karena

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kesulitan dan tidak mempunyai biaya, (3) tingginya keluarga miskin yang putus sekolah karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses biaya pendidikan tetapi untuk sekedar bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir.

Gambaran pendidikan di Provinsi Banten dapat dilihat dari partisipasi pendidikan anak.

Besarnya indikator angka partisipasi sekolah (APS). APS disajikan dalam tiga tingkatan usia, yaitu APS anak usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun.

Tabel 1.1
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah
Penduduk Provinsi Banten, Tahun 2012 – 2014

Kelompok Umur	Tahun		
	2012	2013	2014
Usia 7-12 Tahun			
Laki-laki	98.48	95.82	95.99
Perempuan	97.36	96.95	96.95
Laki-laki + Perempuan	97.92	96.39	96.42
Usia 13-15 Tahun			
Laki-laki	70.65	71.02	69.89
Perempuan	79.16	73.22	71.17
Laki-laki + Perempuan	74.91	72.12	70.53
Usia 16-18 Tahun			
Laki-laki	34.79	46.49	36.93
Perempuan	28.42	47.62	47.12
Laki-laki + Perempuan	31.61	47.06	42.03

Sumber : profil pendidikan Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa angka partisipasi pada tahun 2014 APS Provinsi Banten untuk anak usia 17-12 tahun sebesar 96.42 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia 17-12 tahun yang bersekolah hanya 96.42 persen, sisanya sebesar 3.58 persen tidak bersekolah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan yang putus sekolah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka untuk usia tingkat partisipasi sekolah anak laki-laki di Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan partisipasi perempuan.

Sementara itu, angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun jauh lebih rendah dibanding angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun. Selain masih rendahnya kemampuan ekonomi orang tua, masih terbatasnya jumlah sekolah SMP dan SMA di daerah pedesaan menjadi faktor penyebabnya. APS anak usia 13-15 tahun sebesar 70,53 persen dan APS anak usia 16-18 tahun sebesar 42,03 persen. Angka ini menunjukkan terdapat sekitar 70 anak yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun. Sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun keadaannya lebih buruk, yaitu dari seratus anak hanya sekitar 41 anak yang sedang bersekolah.

Selain APS, biasanya biasanya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap dunia pendidikan digunakan juga angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK). APM merupakan persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan APK merupakan persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Tabel 1.2
APM dan APK Provinsi Banten Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2014

Jenjang Pendidikan	2013		2014	
	APM	APK	APM	APK

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

SD/ MI Sederajat				
Laki-laki	92.01	103.91	93.79	108.92
Perempuan	90.96	108.93	92.41	109.92
Laki-laki + Perempuan	91.49	106.42	93.10	109.42
SMP/MTS Sederajat				
Laki-laki	59.25	75.45	53.88	63.47
Perempuan	60.14	79.97	53.15	63.1
Laki-laki + Perempuan	59.70	77.71	53.52	63.29
SMA/MAN Sederajat				
Laki-laki	31.46	41.29	28.82	42.95
Perempuan	32.98	52.41	41.26	66.77
Laki-laki + Perempuan	32.22	46.85	35.04	54.86

Sumber : profil pendidikan Provinsi Banten, 2014

Pada Tabel 1.2 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada tahun 2014 angka partisipasi murni (APM) di Provinsi Banten untuk pendidikan SD/Sederajat tercatat sebesar 93.10 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari 100 orang anak usia 7-12 tahun di Provinsi Banten, 94 orang diantaranya sedang bersekolah di pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing tercatat sebesar 53.52 persen dan 35.04 persen.

Angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan SD/ sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 109,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program wajar dikdas 6 tahun di Provinsi Banten sudah tercapai. Angka APK yang melebihi 100 persen mengidentifikasi bahwa masih cukup banyak siswa jenjang SD/ sederajat yang berusia di luar 7-12 tahun. APK jenjang pendidikan SMP dan SMA pada tahun 2014 mengalami pasang surut dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2014 APK jenjang pendidikan SMP tercatat sebesar 63.29 persen turun dibandingkan dengan tahun 2013 yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mencapai 77.71 persen sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA naik dari 46.85 persen menjadi 54.86 persen.

Menurut kabupaten/kota dapat diuraikan bahwa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh SD/ sederajat, sedangkan Kota Tangerang dan Kota Cilegon didominasi oleh SLTA. Indeks lama sekolah menurut Kabupaten/Kota yang berada diatas angka Provinsi Banten adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang. (sumber : profil pendidikan Provinsi Banten 2014)


Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono tahun 2005 mengurangi subsidi BBM dan merealokasikan sebagian besar dananya ke empat program besar yang terdiri dari :

- (1) Program BOS dan Bantuan Siswa Miskin, (2) Jaminan Pelayanan Kesehatan, (3) Infrastruktur Pedesaan, (4) Subsidi Langsung Tunai khususnya untuk masyarakat miskin akibat dari meningkatnya harga BBM. Keempat program dirancang untuk meningkatkan mutu dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan dan bantuan langsung tunai. Salah satu program dibidang pendidikan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar adalah program beasiswa bagi siswa miskin atau yang lebih dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Perbedaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini dengan program pendidikan lainnya seperti program PKH yang bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.



dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung), seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). dilihat dari tujuannya program PKH ini memiliki tujuan ganda, yaitu penanggulangan kemiskinan jangka pendek dan pembangunan modal manusia jangka panjang, yang artinya program ini tidak memusatkan perhatian penuh terhadap tingkat pendidikan masyarakat miskin. Oleh karena itu, PKH tidak memiliki dampak apapun terhadap berkurangnya jumlah pekerja anak. Hal ini karena mekanisme PKH kurang memadai dalam mengatasi persoalan pendidikan antara lain jadwal pembayaran bantuan PKH tidak selalu tepat waktu, oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki siswa yang lulus SD tidak memiliki cukup uang pada saat pendaftaran ke SMP; dan bantuan PKH yang tersedia untuk elemen pendidikan tidak cukup untuk pendaftaran masuk ke SMP. Selain itu, jumlah bantuan PKH yang diterima dianggap tidak cukup memberikan insentif bagi anak-anak miskin untuk berhenti bekerja dan kembali bersekolah. (WWW.IPCPolicyResearchBrief42).

Program pendidikan lainnya yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia dan biaya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun.

Meskipun ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan dapat meringankan beban peserta didik. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak dari Rumah Tangga miskin dan rentan yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lain yang tidak ditanggung oleh dana BOS.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melalui APBN menetapkan program “Bantuan Siswa Miskin “ (selanjutnya disebut Program BSM). Program BSM adalah program bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah baik sekolah negeri maupun swasta, yang orang tuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria orang tua miskin atau rumah tangga miskin adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 : 4)

Penetapan sasaran Program BSM, dari yang semula melalui sekolah, telah diubah menjadi Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan. Selanjutnya rumah tangga yang memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa KPS tersebut ke sekolah untuk dicalonkan sebagai Penerima Manfaat Program BSM. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai kuota dan pagu anggaran yang tersedia.

Selain itu, mekanisme Penyaluran Manfaat Program BSM juga diubah yaitu dari penyaluran manfaat BSM satu tahun penuh menjadi penyaluran manfaat dua kali (setiap semester) di dalam satu tahun anggaran, yaitu pada antara bulan Januari - Juni untuk semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 dan bulan Juli – Desember untuk semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan penyaluran manfaat dua kali tersebut, diharapkan dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (drop-out) karena ketidak-

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

tersediaan biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari MI ke MTs atau dari MTs ke MA) dapat terus melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun besarnya jumlah dana yang disalurkan ke penerima manfaat program BSM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Besarnya Dana BSM di Provinsi Banten

Jenjang	Besarnya Dana BSM
SD/MI	RP. 450.000
SMP/MTS	RP. 750.000
SMA/SMK/MA	Rp. 1000.000

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Bantuan BSM (2013)

Dalam penelitian ini peneliti memusatkan penelitian pada pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Sekolah Dasar yang mendapatkan bantuan siswa miskin di UPT Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah berjumlah 27 Sekolah Dasar dengan banyak siswa pada tahun 2013 sebanyak 2035 siswa, pada tahun 2014 berjumlah 2125 siswa dan tahun 2015 berjumlah 2271. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tahun 2014 adapun data penerima dana BSM di UPT Kecamatan Labuan tahu 2014 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Siswa yang Mendapatkan Dana BSM
DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan	83
2	Sekolah Dasar Negeri 2 Labuan	85
3	Sekolah Dasar Negeri 3 Labuan	77

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4	Sekolah Dasar Negeri 4 Labuan	63
5	Sekolah Dasar Negeri 5 Labuan	81
6	Sekolah Dasar Negeri 6 Labuan	73
7	Sekolah Dasar Negeri 7 Labuan	73
8	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 1	74
9	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 2	72
10	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 3	77
11	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 4	82
12	Sekolah Dasar Negeri Rancateureup 1	83
13	Sekolah Dasar Negeri Rancateureup 2	81
14	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1	84
15	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 2	73
16	Sekolah Dasar Negeri 1 Cigondang	74
17	Sekolah Dasar Negeri 2 Cigondang	81
18	Sekolah Dasar Negeri 3 Cigondang	87
19	Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk	86
20	Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk	79
21	Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk	80
22	Sekolah Dasar negeri 1 Caringin	86
23	Sekolah Dasar Negeri 2 Caringin	73
24	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 1	84
25	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2	74
26	Sekolah Dasar Banyu Mekar	73
27	Sekolah Dasar Mardiyuana	87
Jumlah		2125

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang,2014

Alasan penulis memilih UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi penelitian disebabkan penulis menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar(BSM-SD) di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yaitu :*Pertama*, pemberian dana BSM dari pemerintah itu seharusnya dikhususkan kepada siswa yang kurang mampu membiayai pendidikan. Namun kenyataannya masih ditemukannya siswa penerima dana BSM yang tidak sesuai dengan kriteria

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

orang tua miskin atau rumah tangga miskin yang telah dilakukan oleh BPS, dimana saat peneliti melakukan observasi pada banyak siswa penerima dana BSM-SD, terdapat siswa merupakan siswa yang tergolong ekonomi orang tuanya mampu. Sebagai contoh salah satu siswa yang berinisial DF, dimana setelah peneliti melakukan observasi menemukan bahwa bangunan fisik rumah terbuat dari tembok, dan atapnya menggunakan bahan material genteng, serta luas rumah orang tua murid tersebut melebihi 8 m^2 . Hal ini menggambarkan siswa penerima dana BSM tidak sesuai dengan kriteria RSTM. (Hasil wawancara dengan Irwandi Hasan sebagai orang tua herawati Siswa kelas 3 di Sekolah SDN Rancateureup 1, Tanggal 5 Mei 2014)

Kedua, dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima BSM, antara lain digunakan untuk: (1) pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya, (2) pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya (3) transportasi pulang pergi sekolah. Namun berdasarkan observasi penulis di lapangan, masih ditemukannya siswa yang memperoleh bantuan dana BSM yang belum mempunyai perlengkapan sekolah yang memadai seperti sepatu, seragam, dan tas masih dalam keadaan rusak. Hal ini disebabkan orang tua siswa belum sepenuhnya menggunakan dana bantuan BSM untuk keperluan sekolah, akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua siswa atau membayar hutang piutang. (Hasil wawancara dengan ibu Lastri sebagai orang tua Rochmatullah siswa di SDN Cigondang 1, Tanggal 5 Mei 2014)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Ketiga, Berdasarkan panduan pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) jangka waktu pencairan dana BSM adalah dua kali (setiap semester) di dalam satu tahun anggaran yaitu pada semester 1 (satu) dilakukan pada bulan Agustus/September dan pembayaran semester 2 (dua) dilakukan pada Maret/April. Namun pada kenyataannya, penulis masih menemukan masyarakat yang menerima dana Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) hanya dalam satu kali dalam dalam satu tahun anggaran. Artinya waktu pencairan dan bantuan Siswa Miskin tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Hasil wawancara dengan orang tua Desi Fitriani siswa kelas V di SDN 2 Banyu Biru penerima dana BSM, 12 Mei 2014)

Dari paparan permasalahan implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat dengan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, maka dengan itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Tidak tepatnya sasaran program penerima manfaat dana.
2. Penerima manfaat dana belum memahami tujuan dari program BSM
3. Waktu pencairan dana BSM tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas untuk mempermudah penelitian, maka penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini dimaksudkan agar permasalahan lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. Adapun pembatasan masalah penelitian ini adalah : Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang faktual mengenai Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD), maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu : **Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?**

1.4 Tujuan Penelitian

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui impelementasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi administrasi negara, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu dijadikan bahan referensi dalam penelitian sosial lainnya khususnya penelitian tentang kebijakan publik.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan penulis di bidang administrasi publik berdasarkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran masalah impelementasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

3. Peneliti Lain

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

Sebagai sumber informasi dan panduan dan panduan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada objek/masalah yang sama, serta sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai objek yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Dalam Deskripsi teori, peneliti melakukan kajian teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2.1.1 Kebijakan Publik

2.1.1.1 Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan dalam literatur sangatlah beragam, secara umum istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Dibawah ini akan dijelaskan definisi tentang kebijakan menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan yaitu :

“sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

PERINGATAN !!!

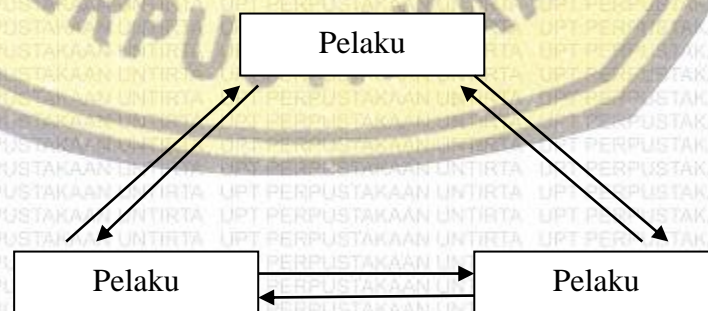
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/semuanya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Gambar 2.1
Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:10)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

Dunn (2000: 111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisah di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Nugroho (2008: 383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi.

“Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output.”

Menurut Kartasmita yang dikutip oleh Widodo (2006:189) mengatakan bahwa :

“kebijakan merupakan untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (dan tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari suatu kebijakan tersebut.”

Menurut Carl Friedrich (Wahab,2005:3) merumuskan pendapatnya bahwa:

“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Selanjutnya menurut Anderson yang dikutip oleh Wahab (2005:2) menyatakan bahwa:

“Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, dalam tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.”

Sedangkan menurut Ekowati (2005:4) dalam bukunya Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

- 1) Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- 2) Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- 3) Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah Thoha (2002:59-60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:

- 1) Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun Kriteria-kriteria kebijakan menurut Dunn (2003 : 24-28) yaitu :

- 1) Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.
- 2) Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.
- 3) Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.
- 4) Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
- 5) Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para tokoh tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil dalam rangka menghilangkan segala macam hambatan yang dialami suatu organisasi agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

2.1.1.2 Pengertian Publik

Kata publik memiliki beberapa arti yang berbeda, Poerwadaminta dalam kamus bahasa Indonesia mengadaptasi kata publik kedalam bahasa Indonesia menjadi publik yang diartikan sebagai masyarakat, rakyat, umum orang banyak. Adapun dalam bahasa Inggris kata *public* diartikan sebagai umum, masyarakat atau Negara.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Secara etimologi, istilah publik dapat didefinisikan sebagai kata benda (*the public*) yang berarti masyarakat umum atau kesamaan hak dalam masyarakat, dan sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh, seperti menyediakan lapangan pekerjaan, hiburan, pelayanan, dan lain sebagainya.

Dari pengertian tersebut, secara garis besar kata *public* dalam bahasa inggris sangat erat berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak seperti juga terkandung dalam kosa kata bahasa Indonesia. Definisi publik yang dipakai dalam penelitian ini adalah definisi publik secara etimologis sebagai kata benda (*the public*) yang diartikan sebagai masyarakat secara umum atau kesamaan hak dalam masyarakat, dan sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Dari pengertian tersebut, secara garis besar kata publik dalam bahasa inggris sangat erat hubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau untuk orang banyak seperti yang juga terkandung dalam kosa kata bahasa Indonesia.

2.1.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami dengan seksama mengenai definisi dari kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. untuk selanjutnya

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

maka akan dijelaskan mengenai pengertian dari kebijakan publik.

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan penggabungan antara kata “kebijakan” dan “publik” merupakan salah satu topik pokok yang sering dikaji dalam pembelajaran ilmu administrasi negara (*public*).

Untuk dapat mengetahui kebijakan publik, ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci dari yang termuat dalam kebijakan publik (Suharto, 2006:44) :

- 1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan *financial* untuk melakukannya.
- 2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- 3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu dari kepentingan orang banyak.
- 4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- 5) Sebuah Justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa badan perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Eaulau dan Prewitt yang dikutip oleh Suharto (2006:7) mendefinisikan kebijakan publik yaitu :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan penanggulangan (*repitesi*) tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan keputusan diantara beberapa alternatif yang ada. Menurut Fedrick yang dikutip oleh Wickasono (2006:63) mendefinisikan kebijakan publik yaitu :

“Suatu arahan tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”

Selanjutnya, kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Wahab,2005 :4) menyatakan bahwa :

“apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.”

Menurut Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik yaitu :

“serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Sedangkan Menurut Easton yang dikutip oleh Nugroho (2008:4) mendefinisikan bahwa : “kebijakan publik sebagai pengaruh (*impact*) dari aktifitas pemerintah.”

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Easton yang dikutip Tangkilisan (2003:119) yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan publik sebagai aktivitas secara otoritas mengalokasikan nilai untuk masyarakat. Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai sebuah perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah untuk memecahkan sebuah isu perhatian publik.”

Menurut Riant Nugroho (2008: 50), menyatakan bahwa :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

“kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Dari sini kita dapat meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa :

- 1) Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.”

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik yang telah didefinisikan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan demi kepentingan umum/masyarakat.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.2.1 Pengertian Implementasi

Sebelum menjelaskan pengertian implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang implementasi. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to implement”* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat-akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat atau lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan publik sebagai *"getting the job done and doing it"*. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan: pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Adapun pengertian implementasi menurut beberapa para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Tjokromidjojo yang dikutip dalam Isni Fahriani (2006:15) memberikan definisi implementasi yaitu :

“implementasi dimaksudkan untuk merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dan program-program pemerintah yang konsisten berdasarkan keputusan-keputusan politik.”

Mazmanian dan Sebatier yang diikuti dalam Wahab (2008:68) merumuskan proses implementasi sebagai berikut:

“implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan Undang-undang, kemudian

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan)”.

Sedangkan menurut Bardach yang dikutip oleh Agustiono (2008:138) berpendapat bahwa :

“Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.”

Selanjutnya menurut Webster dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, (2008:65) bahwa implementasi adalah :

“Those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan)”.

Berdasarkan definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan dan dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi dari berbagai kepentingan.

2.1.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji yang dikutip oleh Agustino (2008:139) mengatakan bahwa:

“implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.”

Menurut Wahab (2008:59) mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh karena itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijaksanaan.

Akan tetapi, menurut Nugroho (2008:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2008:158) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Menurut kamus Webster, yang dikutip oleh Wahab (2008:64) merumuskan secara pendek bahwa :

“*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.”

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan batasan-batasan mengenai implementasi kebijakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Peter De Leon dan Linda De Leon yang dikutip oleh Nugroho (2008:437) terdapat beberapa model implementasi kebijakan yaitu, Pertama generasi pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Generasi kedua tahun 1980-an yaitu generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah. Generasi ketiga yaitu generasi pada tahun tahun 1990-an, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel yang perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun penjelasan dari ketiga generasi yang telah di atas adalah sebagai berikut:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

1. Model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut Nugroho (2008:440) menyatakan bahwa model ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu :

- a) Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teknis pelaksanaan dan keragaman objek.
- b) Variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkies, dan perekrutan pejabat pelaksana.
- c) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi yaitu pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi kebijakan tersebut.

2. Model implementasi George C. Edward III

Menurut Nugroho (2008:447) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dan sekaligus penulis akan menjadikan faktor-faktor dibawah ini sebagai indikator yaitu:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

a) Komunikasi (*Communication*)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumberdaya (*Resource*)

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja.

c) Disposisi (*Dispotion*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structures*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

3. Model implementasi Grindle

Menurut Wibawa dalam Nuroho (2008:445) mengungkapkan bahwa model ini lebih menekankan isi kebijakan dan konteks implementasinya. Adapun isi implementasi kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuatan kebijakan.
- e) (Siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Dari pemaparan dari beberapa model di atas dapat disimpulkan bahwa Teori Edward III lebih menekankan pada aspek kelembagaan seperti personil dan kepemimpinannya. Pada Teori Grindle lebih

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

memfokuskan pada sisi manajemen, artinya tujuan yang realistis harus mampu dicapai. Implementasi kebijakan Grindle tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih dari itu juga berlanjut pada jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Pada Teori Van Meter dan Van Horn sendiri fokusnya lebih kompleks, artinya teori ini memfokuskan baik pada lembaga (organisasi) maupun manajemennya.

Dari penjelasan teori implementasi kebijakan publik di atas, dalam penelitian ini penulis cenderung mengacu pada teori implementasi dari Edward III karena tujuan dari penelitian ini adalah implementasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang akan dijadikan indikator penelitian, dikarenakan Pendekatan ini dianggap lebih kondusif di dalam memahami kompleksitas persoalan implementasi yang seringkali terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi kebijakan publik.

Disamping itu pendekatan ini lebih mampu untuk secara langsung memberikan resep yang memungkinkan proses perbaikan yang diinginkan oleh pelaksana tatkala menghadapi situasi problematika yang berhadapan dengan kendala proses implementasi kebijakan. Edward III menyimpulkan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bahwa pendekatan keempat faktor tersebut merupakan inti dasar dari bekerjanya proses implementasi kebijakan publik, yang masing-masing variable dan faktor tersebut terdiri dari beberapa sub komponen yang sangat penting dalam melihat proses implementasi yang terjadi. Pada kategori komunikasi misalnya dijelaskan bahwa variable ini terdiri dari sub komponen seperti transmisi (*transmission*) antara pelaksan.

Keempat faktor tersebut dalam pandangan Edward III mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Faktor komunikasi misalnya mempengaruhi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pelaksanaannya dalam konteks implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini memandang bahwa komunikasi dan struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan adalah menjadi variabel penting dalam menggerakkan sumber daya dan disposisi yang dapat diciptakan dan digunakan oleh implementator untuk mempertajam dan mencapai sasaran kebijakan yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Meskipun masing-masing faktor tersebut memiliki derajat pengaruh yang sama terhadap perspektif implementasi kebijakn , namun pengaruh aspek komunikasi dan struktur birokrasi seringkali dimediasi oleh faktor sumber daya dan disposisi dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Dengan kata lain faktor komunikasi dan struktur birokrasi dianggap memiliki hubungan langsung dengan aspek keberhasilan dan kegagalan implementasi. Dengan demikian dari berbagai pendekatan analisa kebijakan yang dijelaskan diatas, adalah pendekatan yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dijelaskan oleh Edward III (1980) lebih memadai untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena implementasi kebijakan yang dilakukan di daerah tersebut. Di samping itu pendekatan ini lebih konsisten dalam melihat dan memahami proses dari kegiatan implementasi kebijakan yang didasarkan oleh pertimbangan aktivitas implementasi yang ada didalamnya.

2.1.3 Pengertian Kemiskinan

Menurut BPS (2011:45) menyatakan pendapat mengenai kemiskinan yaitu :

“Definisi umum kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik”.

Menurut Ellis (1998) dalam Mahaga (2009) mengungkapkan bahwa :

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional. dimensi kemiskinan menyangkut berbagai aspek, diantaranya adalah ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Sedangkan menurut Quibria (dalam Surjono, 2007 : 41) mengemukakan bahwa :

“kemiskinan lebih ditekankan pada kondisi miskin sebagai individu yang membedakannya dari orang lain yang tidak miskin. Dengan kata lain, kemiskinan digunakan sebagai cara untuk mengklasifikasikan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

bahwa individu dikatakan miskin apabila dia tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan normalnya.”

Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena persoalan aksesibilitas Akibat keterbatasan dan ketertediaan akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian penduduk miskin mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi penduduk miskin untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, tidak terbatas pada kemiskinan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya), tetapi kemiskinan juga mencakup aspek sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan berarti tidak tercapainya standar hidup yang layak.

2.1.4 Bantuan Siswa Miskin (BSM)

2.1.4.1 Konsep Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan (2013:3) memberikan definisi mengenai BSM adalah sebagai berikut :

“Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.”

Selanjutnya menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2011:5) memeberikan definisi mengenai Beasiswa bagi siswa miskin

PERINGATAN !!!

- 1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.**
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.**
- 3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.**

jenjang SD yang selanjutnya disebut dengan Beasiswa Miskin (BSM-SD) adalah :

“Bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penerima beasiswa adalah siswa SD baik negeri maupun swasta yang duduk dikelas I, II, III, IV, V, VI yang telah ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Siswa miskin/mampu adalah siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Lembaga penyalur adalah lembaga yang menyalurkan dana BSM-SD didaerah.”

BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan masing-masing siswa penerima BSM, antara lain digunakan untuk: (1) pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya, (2) pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya (3) transportasi pulang pergi sekolah.

Jangka waktu pencairan BSM adalah selama satu semester sekali setelah batas waktu pencairan Bantuan Siswa Miskin SD. Jika siswa tidak mengambil uang setelah 3 (tiga) bulan, maka rekening akan diblokir dan uang akan dikembalikan kepada kas negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Bab I pasal 2 ayat (1) menyatakan : “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana strategis satuan pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana kerja tahunan sekolah.

Secara umum tujuan pemberian BSM adalah mengamankan program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal). Secara khusus program BSM ini bertujuan :

1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak.
2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah.
3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.

Dasar hukum pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Kecamatan Labuan didasari pada pedoman perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Periode 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014.
9. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Landasan hukum yang telah dipaparkan di atas, merupakan acuan dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan dalam melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Agar dapat mensinergikan antara penanggulangan pendidikan anak masyarakat miskin baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten.

2.1.4.2 Sasaran dan Satuan Biaya

Sasaran program BSM APBNP adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2013/2014 masih berstatus sebagai siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria sebagai berikut:

1. Siswa yang orangtuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial;
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin;
3. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH;
4. Yatim dan/atau piatu;
5. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal lainnya)

Kepada setiap siswa yang menerima KPS dan siswa yang berhak sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebagai penerima dana Program BSM, berhak menerima bantuan sebesar :

1. Untuk siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah: Rp. 225.000 /siswa/semester, atau Rp. 450.000,-/siswa/tahun
2. Untuk siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah : Rp. 375.000,-/siswa/semester, atau Rp. 750.000,-/siswa/tahun

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. untuk siswa SMA/Madrasah Aliyah : Rp. 500.000,-/siswa/semester, atau Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun

2.1.4.3 Mekanisme Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM)

1. Penetapan Sasaran menggunakan Kartu Perlindungan

Sosial

- a. Kartu Perlindungan Sosial, dimana diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan jika rumah tangga tersebut memiliki anak-anak berusia sekolah, dapat membawa Kartu tersebut ke sekolah agar dapat dicalonkan sebagai Penerima Manfaat Program BSM.
- b. Kartu ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga Program BSM agar menjangkau anak-anak sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan sesuai pagupenerima BSM di masing-masing Kabupaten/Kota.
- c. Anak-anak yang telah menerima KPS kemudian membawa kartu tersebut ke sekolah dimana anak diterima untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah sedang berhalangan/tidak berada di tempat.

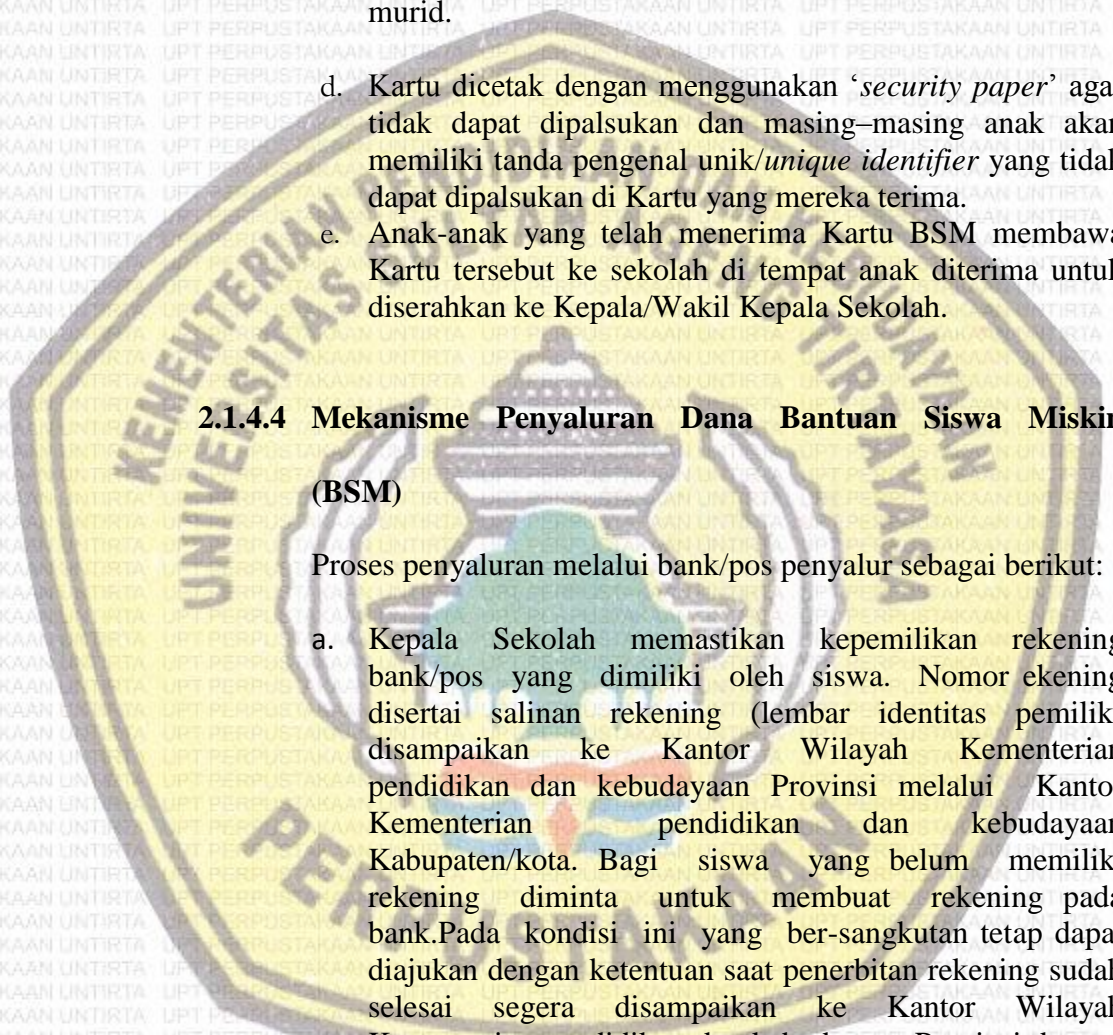
2. Penetapan sasaran menggunakan Kartu Calon Penerima

BSM

- a. Mekanisme pemberian Kartu Calon Penerima BSM diselenggarakan untuk memperbaiki ketepatan penetapan sasaran penerima program BSM agar lebih dapat menjangkau anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, sehingga siswa yang beresiko putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan sekolahnya, dapat terus bersekolah dan mendapatkan haknya secara penuh.
- b. Penerima Kartu BSM ditentukan berdasarkan informasi anak – anak usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin yang ada di Basis Data Terpadu TNP2K, dengan mempertimbangkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 pada tahun pelajaran 2012 sampai dengan tahun 2013.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
- c. Anak usia sekolah dari keluarga miskin akan mendapatkan Kartu Calon Penerima BSM yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia pada bulan April hingga Mei 2013 langsung ke alamat masing-masing rumah tangga, berisi informasi *pre-printed* nama anak, alamat dan nama orang tua/wali murid.
 - d. Kartu dicetak dengan menggunakan ‘*security paper*’ agar tidak dapat dipalsukan dan masing-masing anak akan memiliki tanda pengenal unik/*unique identifier* yang tidak dapat dipalsukan di Kartu yang mereka terima.
 - e. Anak-anak yang telah menerima Kartu BSM membawa Kartu tersebut ke sekolah di tempat anak diterima untuk diserahkan ke Kepala/Wakil Kepala Sekolah.

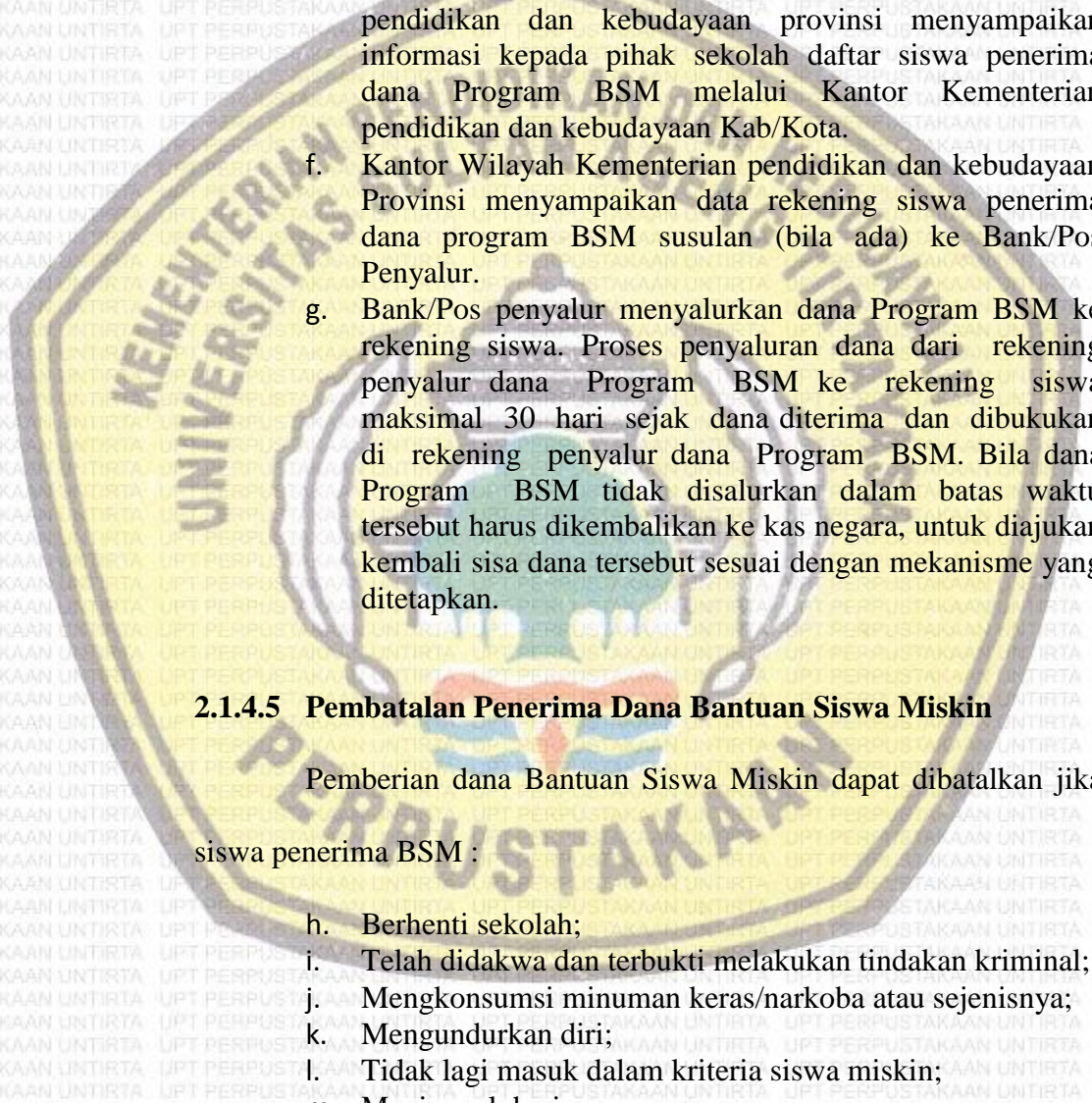
2.1.4.4 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Proses penyaluran melalui bank/pos penyalur sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah memastikan kepemilikan rekening bank/pos yang dimiliki oleh siswa. Nomor rekening disertai salinan rekening (lembar identitas pemilik) disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi melalui Kantor Kementerian pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/kota. Bagi siswa yang belum memiliki rekening diminta untuk membuat rekening pada bank. Pada kondisi ini yang ber-sangkutan tetap dapat diajukan dengan ketentuan saat penerbitan rekening sudah selesai segera disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi dengan sebagai dokumen susulan.
- b. Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi Negeri membuat dokumen pengajuan SPP dilampiri surat persetujuan penggunaan rekening penyalur dan daftar siswa penerima dana Program BSM dilengkapi dengan nomor rekening masing-masing siswa. Dalam hal proses pengajuan SPM, kebutuhan pencantuman nomor rekening dapat menggunakan nomor rekening penyaluran dana Program BSM Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi Negeri sambil menunggu proses penerbitan rekening selesai.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

- 
- c. Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi Negeri mengajukan SPM ke KPPN disertai surat izin yang dikeluarkan Kementerian Keuangan;
 - d. KPPN menyalurkan dana Program BSM ke rekening bank/Pos penyalur.
 - e. Setelah SP2D diterbitkan, Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan provinsi menyampaikan informasi kepada pihak sekolah daftar siswa penerima dana Program BSM melalui Kantor Kementerian pendidikan dan kebudayaan Kab/Kota.
 - f. Kantor Wilayah Kementerian pendidikan dan kebudayaan Provinsi menyampaikan data rekening siswa penerima dana program BSM susulan (bila ada) ke Bank/Pos Penyalur.
 - g. Bank/Pos penyalur menyalurkan dana Program BSM ke rekening siswa. Proses penyaluran dana dari rekening penyalur dana Program BSM ke rekening siswa maksimal 30 hari sejak dana diterima dan dibukukan di rekening penyalur dana Program BSM. Bila dana Program BSM tidak disalurkan dalam batas waktu tersebut harus dikembalikan ke kas negara, untuk diajukan kembali sisa dana tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

2.1.4.5 Pembatalan Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin

Pemberian dana Bantuan Siswa Miskin dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM :

- h. Berhenti sekolah;
- i. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal;
- j. Mengonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya;
- k. Mengundurkan diri;
- l. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin;
- m. Meninggal dunia.

Kepala sekolah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan Bantuan Siswa Miskin serta memilih siswa penggantinya bila masih didapati siswa yang memiliki kriteria dan ketentuan siswa miskin. Keputusan penetapan pengganti tersebut harus segera

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dikirimkan ke Kantor Kementerian Kabupaten/Kota untuk segera diterbitkan Keputusan Pengganti. Keputusan Pengganti tersebut dijadikan dasar bagi sekolah untuk pengalihan penyaluran dana BSM ke siswa. Bagi sekolah dasar negeri dapat melakukan proses penggantian melalui mekanisme persetujuan bersama dengan komite sekolah.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian Aulia Kamal Altatur

Skripsi Aulia Kamal Altatur Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang berjudul “Diskresi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) (*Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Sebanen II Kalisat Kabupaten Jember*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar dengan menggunakan diskresi pelaksana program.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di SDN Sebanen II Kecamatan Kalisat. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitiannya adalah sekolah dengan menggunakan dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merancang pelaksanaan program dengan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk pengelolaan dana untuk diadakan peralatan sekolah, selanjutnya peralatan sekolah dibagi merata kepada setiap siswa di sekolah.

Dasar sekolah untuk pengelolaan dan pembagian peralatan sekolah kepada setiap siswa ini dikarenakan beberapa hal berikut: 1) Kuota atau batasan jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di sekolah; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat penerima program untuk menggunakan bantuan sebagaimana tujuan yang ditetapkan; dan 3) Potensi konflik yang dimungkinkan terjadi akibat kecemburuan sosial antarmasyarakat penerima dan yang tidak menerima bantuan. Dengan sistem penyaluran demikian berdampak kepada jumlah yang diterima bagi siswa penerima yang terdaftar dalam pengajuan program BSM-SD. Jumlah yang seharusnya Rp 360.000,00 per siswa yang terdaftar dalam calon penerima tahun ajaran 2011/2012, berkurang menjadi Rp 157.000,00 persiswa.

2.2.2 Penelitian Metalia Ulfah

Skripsi Metalia Ulfah Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Beasiswa Miskin (BSM-SMK/SMA) Di SMK Asshodiqiyah Semarang". Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program BSM-SMA/SMK di SMK Asshodiqiyah Semarang serta untuk mengetahui dampak dari program tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengambilan informan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelitian dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan didalam petunjuk pelaksanaan program BSM-SMA/SMK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Namun Pelaksanaan program BSM-SMA/SMK di Kota Semarang, khususnya di SMK Asshodiqiyah belum dapat dikatakan berhasil karena dana tersebut belum mampu meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin. Selain itu sekolah tersebut masih suka mengadakan pungutan-pungutan seperti uang gedung, SPP, Buku Peket Pelajaran dengan jumlah yang sangat memberatkan orang tua siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan. (2) Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin memperoleh akses layanan pendidikan, namun manfaat atau dampak dari program tersebut belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh orang tua siswa penerima BSM-SMA/SMK dan mereka tetap harus menanggung biaya pendidikan.

2.2.3 Penelitian Mustika W Sastia Hutasuhut

Skripsi Mustika W Sastia Hutasuhut Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas USU yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar". Tujuan umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui bagaimana dana BOS dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau tidak mampu di SD Negeri 125549 Pematangsiantar.

Manfaat dari penelitian ini adalah secara akademis, diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan kajian dan sumber bacaan di lingkungan FISIP USU khususnya bidang ilmu kesejahteraan Sosial. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap penelitian.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana populasinya berjumlah 247 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah 34 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak stratifikasi proporsional. Teknik penarikan sampel ini diterapkan dalam kondisi dimana populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian.

Hasil analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 125549 Kelurahan Martoba kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar berjalan dengan baik. Dalam hal ini program BOS sangat membantu meringankan beban keluarga

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

terhadap biaya pendidikan sehingga sangat membantu keluarga miskin atau tidak mampu dalam mengenyam pendidikan sebagaimana semestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Kamal Altatur dan Metalia Ulfah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua hasil penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat miskin masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Kuota atau batasan jumlah penerima tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di sekolah;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat penerima program untuk menggunakan bantuan sebagaimana tujuan yang ditetapkan;
3. Potensi konflik yang dimungkinkan terjadi akibat kecemburuan sosial antara masyarakat penerima dan yang tidak menerima bantuan.
4. Dana BSM belum mampu meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin.
5. Selain itu sekolah tersebut masih suka mengadakan pungutan-pungutan seperti uang gedung, SPP, Buku Paket Pelajaran dengan jumlah yang sangat memberatkan orang tua siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan.

Akan tetapi menurut hasil penelitian dari Mustika W Sastia Hutasuhut, program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat miskin sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

program BOS sangat membantu meringankan beban keluarga terhadap biaya pendidikan sehingga sangat membantu keluarga miskin atau tidak mampu dalam mengenyam pendidikan sebagaimana semestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta program ini sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, termasuk siswa maupun orangtua siswa.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penangan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.. Salah satu kebijakan atau program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun selama peneliti melakukan pengamatan atau observasi kelengkapan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang mengalami banyak hambatan yang menyebabkan program ini belum berjalan secara optimal.

Dengan adanya hambatan tersebut. Maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang menggunakan teori implementasi kebijakan publik model yang

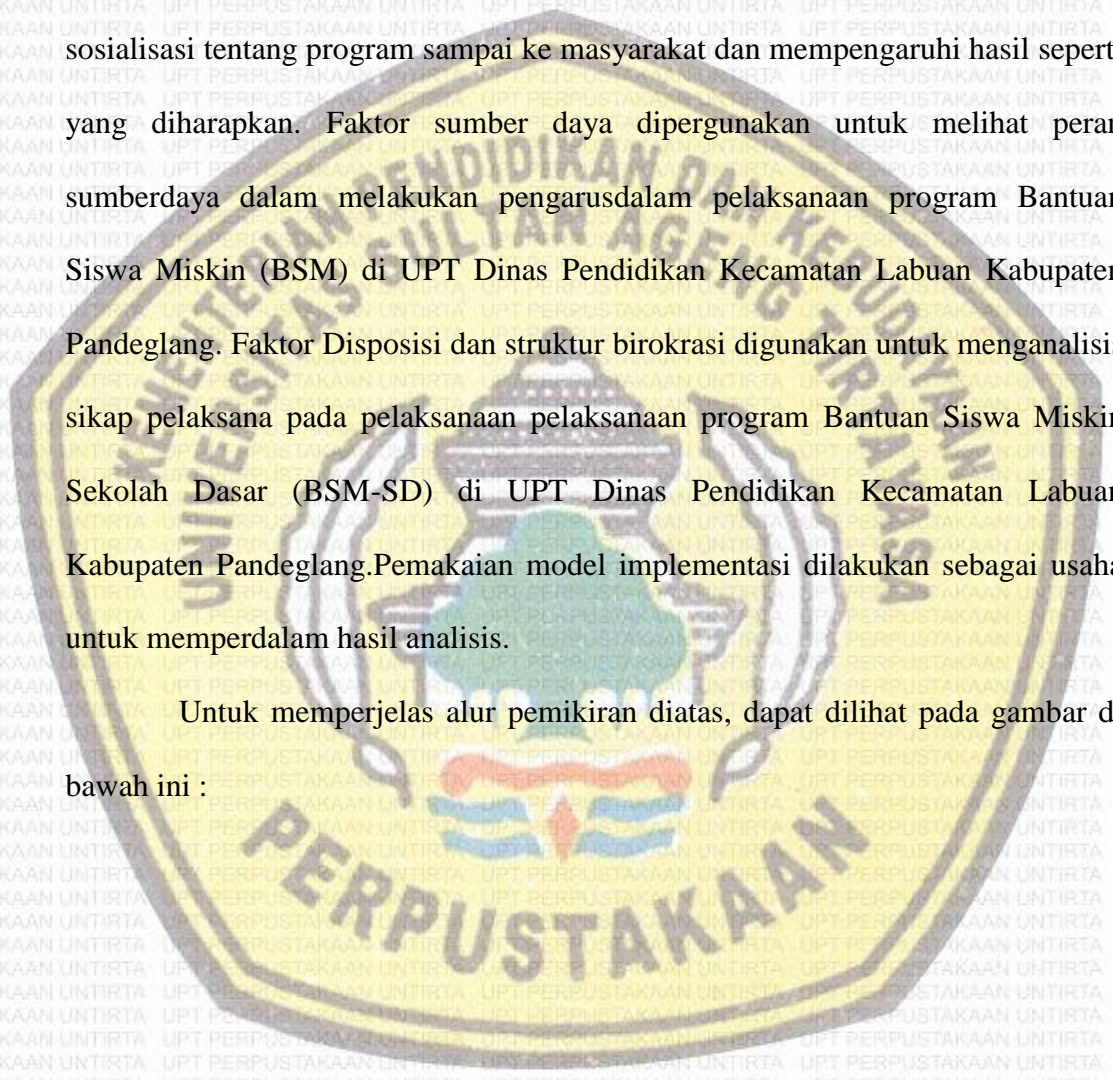
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/ seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

dikemukakan Edward III yang dikutip Nugroho (2008:447) yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Faktor Komunikasi dipakai untuk melihat sejauh mana informasi dan sosialisasi tentang program sampai ke masyarakat dan mempengaruhi hasil seperti yang diharapkan. Faktor sumber daya dipergunakan untuk melihat peran sumberdaya dalam melakukan pengarusdalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Faktor Disposisi dan struktur birokrasi digunakan untuk menganalisis sikap pelaksana pada pelaksanaan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Pemakaian model implementasi dilakukan sebagai usaha untuk memperdalam hasil analisis.

Untuk memperjelas alur pemikiran diatas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tidak tepatnya sasaran program penerima manfaat dana.
2. Penerima manfaat dana belum memahami tujuan dari program BSM
3. Waktu pencairan dana BSM tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Implementasi Kebijakan Teori Edward III
Dalam Nugroho (2008:447)

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Tercapainya Pelaksanaan Implementasi
Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah
dasar (BSM-SD) yang optimal

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi yang empiris (Sugiyono, 2011:64)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Adapun pernyataan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_a : \mu > 60 \%$

H_a : pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang paling rendah 60% dari nilai ideal

2. $H_o : \mu \leq 60 \%$

H_o : Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang paling tinggi atau sama dengan 60 % dari nilai ideal

Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, maka peneliti akan mengambil hipotesis statistik/ nol ($H_o : \mu \leq 60 \%$) penelitian yaitu ***“Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang paling tinggi atau sama dengan 60% dari nilai ideal.”***

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Agar proses penelitian dapat berjalan dengan mudah dan terarah maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang sesuai dengan desain riset yang bersangkutan. Metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan definisi tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan Sugiyono (2011 : 1).

Selaras dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik deskriptif. Penelitian ini diupayakan untuk memberi gambaran mengenai implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) sehingga akhirnya dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjangkau data melalui peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus perhatian penelitian untuk digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya, yaitu Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan peubah penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, penulis akan mencoba mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

3.3 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diangkat, yakni “Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang”, maka penelitian yang akan dilakukan mengambil lokasi di di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Adapun Objek penelitian adalah orang tua siswa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang menerima bantuan dana BSM. Alasan memilih lokasi adalah karena berdasarkan pengamatan bahwa pelaksanaan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal, sebagaimana yang telah penulis bahas pada latar belakang masalah.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 31).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan satu variabel atau variabel mandiri. Adapun variabel yang akan diamati adalah pelaksanaan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

3.4.1 Definisi Konsep

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, keluarga atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. (Indriantoro, 2002:69)

Dalam penelitian ini, definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat menggambarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau implementasi adalah salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat maupun pemerintah sendiri.
2. Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Siswa miskin adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang orang tuanya kurang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik (Indriantoro, 2002:69)

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) yang akan diukur melalui indikator yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*) merupakan tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya (*Resource*) merupakan sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif seperti sumber daya manusia maupun sumber daya financial.
3. Disposisi (*Dispotion*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structures*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, operasional variabel penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pernyataan	No Item
Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin di UPT Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	Komunikasi	Komunikasi mengenai pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)	1,2,3
		Kejelasan informasi yang diberikan pelaksana kebijakan	4,5,6
	Sumber Daya	Adanya dukungan dari sumber daya manusia yang handal	7,8,9
		Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)	10,11,12
	Disposisi	Sikap petugas dalam menjalankan kebijakan	13,14,15
		Penilaian masyarakat terhadap program BSM	16,17,18
	Struktur Birokrasi	Para petugas menjalankan Tupoksi sesuai dengan pedoman	19,20,21
		Adanya Pembagian tugas yang jelas	22,23,24
		Adanya tanggung jawab petugas dalam menjalankan kebijakan	25,26,27

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.5 Instrument Penelitian

Menurut Emory dalam Sugiyono (2011:118) pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah suatu proses pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik dalam penelitian bisanya digunakan instrument penelitian.

Sedangkan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Model angket yang digunakan adalah skala likert seperti di bawah ini :

Tabel 3.2
Skala Likert

Alternatif jawaban	Bobot
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber :Sugiyono (2012:107)

3.5.1 Jenis dan Sumber Data

3.5.1.1 Jenis Data

- Data Primer, yakni data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan (observasi) dan kuesioner (angket).
- Data Sekunder yakni data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti, melainkan diperoleh dari orang lain dan dokumen seperti buku pedoman program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan informasi yang diberikan masyarakat kepada peneliti.

PERINGATAN !!!

- Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
- Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.5.1.2 Sumber Data

- a. Responden yaitu orang tua siswa di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang mendapatkan bantuan BSM.
- b. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner yaitu suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner merupakan hal yang pokok untuk mengumpulkan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data berupa informasi tentang jumlah dana yang diberikan kepada setiap siswa dan data-data mengenai pelaksanaan program BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara merupakan bagian dari teknik komunikasi dimana pencari data mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk menggali data yang diperlukan.

4. Observasi

Observasi yaitu peneliti mengadakan penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap segala fenomena yang ada hubungannya dengan kemiskinan dan kemudian dicatat guna melengkapi data yang diperoleh.

3.5.3 Teknik Penentuan Kualitas Instrumen

3.5.3.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument penelitian yang telah dilakukan benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian ini merupakan akurasi temuan peneliti yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda (ghozali dan Iksan, 2010 : 118).

Adapun rumus Korelasi *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Keterangan

r = Koefisien Korelasi

x = Skor butir

y = Skor total

$\sum xy$ = Jumlah perkalian antara skor x dan y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor x

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor y

Perhitungan uji validitas dengan menggunakan program SPSS 20 yaitu korelasi *Bivariate Pearson* (Product moment pearson) dan *Corrected Item-Total Correlation*. Dengan ketentuan kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 5 % atau 0.05 yaitu jika r hitung $\geq r$ tabel, maka instrument pernyataan- pernyataan kuesioner berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid, dan jika r hitung $< r$ tabel maka pernyataan- pernyataan dalam kuesioner tidak valid.

3.5.3.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan, untuk keperluan pengujian tersebut. Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrument yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak pada responden yang sama (Umar, 2008 : 61). Untuk menguji reliabilitas keseluruhan item, pada penelitian ini digunakan rumus Sparmen Brown yaitu sebagai berikut :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_i = Reliabilitas internal seluruh item

r_b = Korelasi Product moment antara belahan pertama dan kedua

Dalam menggunakan uji reliabilitas digunakan metode alfa (*Cronbach's*) dengan bantuan program SPSS 16, dengan ketentuan penilaian dari alfa (*Cronbach's*) lebih besar dari pada 0.60 maka data tersebut reliabel.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2011 : 90)

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang mendapatkan bantuan dalam Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 2125 orang, untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Tabel 3.3
Jumlah Siswa yang Mendapatkan Dana BSM
DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan	83
2	Sekolah Dasar Negeri 2 Labuan	85
3	Sekolah Dasar Negeri 3 Labuan	77
4	Sekolah Dasar Negeri 4 Labuan	63
5	Sekolah Dasar Negeri 5 Labuan	81
6	Sekolah Dasar Negeri 6 Labuan	73
7	Sekolah Dasar Negeri 7 Labuan	73
8	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 1	74
9	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 2	72
10	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 3	77
11	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 4	82
12	Sekolah Dasar Negeri Rancatereup 1	83
13	Sekolah Dasar Negeri Rancatereup 2	81
14	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1	84
15	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 2	73
16	Sekolah Dasar Negeri 1 Cigondang	74
17	Sekolah Dasar Negeri 2 Cigondang	81
18	Sekolah Dasar Negeri 3 Cigondang	87
19	Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk	86
20	Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk	79
21	Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk	80
22	Sekolah Dasar negeri 1 Caringin	86
23	Sekolah Dasar Negeri 2 Caringin	73
24	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 1	84
25	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2	74
26	Sekolah Dasar Banyu Mekar	73
27	Sekolah Dasar Mardiyuana	87
Jumlah		2125

Sumber : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruhnya karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Sampel harus diambil dengan cara acak agar penelitian menjadi praktis, karena mengingat bahwa untuk meneliti seluruh populasi akan memakan waktu yang cukup lama. (Sugiyono, 2011 : 62)

Untuk penentuan ukuran sampel dari populasi, dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % yaitu :

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

$$n = \frac{2125}{2125 (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2125}{21,25 + 1}$$

$$n = \frac{1439}{22,25}$$

$$n = 95,51 \text{ dibulatkan menjadi } 96 \text{ responden}$$

Keterangan rumus Slovin di atas :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian 10 %

(Umar, 2011:78)

3.6.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah **Probability sampling** dengan tipe Proportional Random Sampling. *Proportional random sampling* yakni membagi populasi ke dalam sub populasi. Dalam penelitian ini (Sugiyono, 2011 : 75), penulis membagi populasi yang berjumlah 1439 orang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

ke dalam sub populasi. Responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang mendapatkan bantuan dalam Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Besarnya sampel setiap sub populasi diambil secara proporsional dengan sub populasi yang lain, sehingga setiap sub populasi dapat terwakili secara proporsional sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan rumus Slovin, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.4
Perhitungan Jumlah Sampel Secara Proporsional

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Perhitungan	Jumlah Sampel
1	Sekolah Dasar Negeri 1 Labuan	83	$83 / 2125 \times 96$	4
2	Sekolah Dasar Negeri 2 Labuan	85	$85 / 2125 \times 96$	4
3	Sekolah Dasar Negeri 3 Labuan	77	$77 / 2125 \times 96$	3
4	Sekolah Dasar Negeri 4 Labuan	63	$63 / 2125 \times 96$	3
5	Sekolah Dasar Negeri 5 Labuan	81	$81 / 2125 \times 96$	3
6	Sekolah Dasar Negeri 6 Labuan	73	$73 / 2125 \times 96$	3
7	Sekolah Dasar Negeri 7 Labuan	73	$73 / 2125 \times 96$	3
8	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 1	74	$74 / 2125 \times 96$	3
9	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 2	72	$72 / 2125 \times 96$	3
10	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 3	77	$77 / 2125 \times 96$	4
11	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar 4	82	$82 / 2125 \times 96$	4
12	Sekolah Dasar Negeri Rancatereup 1	83	$83 / 2125 \times 96$	4
13	Sekolah Dasar Negeri Rancatereup 2	81	$81 / 2125 \times 96$	4
14	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 1	84	$84 / 2125 \times 96$	4
15	Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 2	73	$73 / 2125 \times 96$	3
16	Sekolah Dasar Negeri 1 Cigondang	74	$74 / 2125 \times 96$	3
17	Sekolah Dasar Negeri 2 Cigondang	81	$81 / 2125 \times 96$	4
18	Sekolah Dasar Negeri 3 Cigondang	87	$87 / 2125 \times 96$	4
19	Sekolah Dasar Negeri 1 Teluk	86	$86 / 1438 \times 85$	4
20	Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk	79	$79 / 2125 \times 96$	4
21	Sekolah Dasar Negeri 3 Teluk	80	$80 / 2125 \times 96$	4

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

22	Sekolah Dasar negeri 1 Caringin	86	$86 / 2125 \times 96$	4
23	Sekolah Dasar Negeri 2 Caringin	73	$73 / 2125 \times 96$	3
24	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 1	84	$84 / 2125 \times 96$	4
25	Sekolah Dasar Negeri Banyubiru 2	74	$74 / 2125 \times 96$	3
26	Sekolah Dasar Banyu Mekar	73	$73 / 2125 \times 96$	3
27	Sekolah Dasar Mardiyuana	87	$87 / 2125 \times 96$	4
Jumlah		2125		96

Sumber : hasil perhitungan menurut Sugiyono (2011 :81)

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan suatu cara mengolah data yang telah didapat atau disajikan ke dalam pembahasan secara sistematis, sedangkan metode analisis adalah upaya dari peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pembaca dan penguji.

3.7.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data yang dilaksanakan. Pada penelitian yang bersifat kuantitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*) dan proses pembeberan (*tabulating*). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memeriksa (*editing*)

Kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan. pada proses ini dimulai dengan memberikan identitas pada instrument yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu persatu lembar instrumen pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila terjadi kejanggalan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

pada instrumen tersebut, berilah identitas tertentu pada instrumen dan poin yang janggal tersebut.

2. Pemberian identitas (*coding*)

Setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahap *coding*.

Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Kemudian diberi skor dengan menggunakan *skala likert*.

3. Pembeberan (*tabulating*)

Merupakan proses memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya (Bungin, 2009:165:168).

3.7.2 Analisis Data

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Dimana analisis dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat rumusan masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang didapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi serta menyajikan data baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran ataupun dalam bentuk pie.

Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, maka penulis menggunakan pengujian hipotesis **t-tes satu sampel** menggunakan uji pihak kanan. Kebenaran hipotesis yang akan di uji, terlebih dahulu harus diketahui rancangan hipotesisnya, oleh karena itu maka penulis mengklasifikasikan rancangan hipotesis sebagai berikut:

a. Perhitungan t_{tabel} dan t_{hitung}

1) Mencari t_{hitung}

Adapun rumus pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$t = \frac{x - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana :

t = Nilai yang dihitung

X = Nilai rata-rata

μ = Nilai yang dihipotesiskan

s = Simpangan baku

n = Jumlah anggota sampel

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2) Mencari t tabel

t tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi student, dengan tingkat db = $n-1$, signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05

b. Kriteria penerimaan hipotesis

Hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dimana jika :

1) $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima,

artinya Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang tinggi atau sama dengan 60 % dari nilai ideal

2) $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, artinya

pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang rendah 60% dari nilai ideal. Hipotesis statistik.

c. Hipotesis statistik

1) $H_a : \mu > 60\%$

H_a : pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang rendah 60% dari nilai ideal

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

2) $H_0 : \mu \leq 60 \%$

H_0 : Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglangpaling tinggi atau sama dengan 60% dari nilai ideal

3.8 Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Waktu penelitian dari bulan Oktober 2014 sampai dengan April 2015.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kecamatan Labuan

Kecamatan Labuan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, secara geografis Kecamatan Labuan terletak antara $06^{\circ}13'$ – $06^{\circ}24'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}49'$ - $105^{\circ}54'$ Bujur timur dengan luas daerah 15.65 km^2 Kecamatan Labuan berjarak 41.1 km dari Kabupaten Pandeglang dan memiliki batas administrasi, sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Carita
- Selatan: Kecamatan Pagelaran
- Barat : Kecamatan Sunda
- Timur : Kecamatan Cikedal

Kecamatan Labuan secara administrasi terdiri dari 9 Desa, 70 rukun warga (RW) dan 224 rukun tetangga (RT). Desa Sukamaju merupakan desa terkecil dengan luas 0.6 km^2 , sedangkan Desa Banyubiru merupakan desa terbesar dengan luas 6.1 km^2 . bentuk topografi wilayah Kecamatan Labuan pada umumnya merupakan sebagian dataran seperti desa Rancateureup, Kalanganyar, Labuan, Banyumekar, Banyubiru serta pesisir pantai seperti desa Cigondang, Sukamaju, Teluk dan Caringin dengan ketinggian rata-rata dibawah 50m dari permukaan laut, sehingga sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan disamping jenis pekerjaan lainnya.

4.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2008 tentang pembentukan Sekertariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Dinas yang didalamnya termasuk pembentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sehingga terbentuk pula UPTD TK, SD pada setiap Kecamatan sebagai unsur pelaksana teknis dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

4.1.3 Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang TK, SD.

4.1.4 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan TK, SD di sekolahnya.
2. Penyelenggaraan dan pengelolaan TK, SD di sekolahnya.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan TK, SD di sekolahnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari unsur-unsur :

1. Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TK, SD.
2. Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
3. Pelaksana adalah petugas operasional.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

4. Kelompok jabatan fungsional.

4.1.5 Susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Petugas Operasional Bidang Pendidikan
4. Petugas Operasional Bidang Kepegawaian
5. Petugas Operasional Bidang Sarana Prasarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.6 Bidang Tugas Unsur-unsur UPTD :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan TK, SD.

a. Sub Bagian Tata Usaha :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kurikulum dan kesiswaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas , sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi.

- 1) Penyelenggaraan dan penglolaan kegiatan di bidang administrasi umum yang meliputi :surat menyurat, pengurusan kepegawaian, keuangan , rumah tangga, kurikulum dan kesiswaan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan,dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- 2) Penyiapan dan penyusunan rencana anggaran UPTD.
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data / laporan UPTD.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

2. Petugas Operasional Bidang Pendidikan :

Petugas operasional bidang pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pengelolaan alat-alat administrasi dan buku-buku TK, SD , bangunan kantor dan perpustakaan TK, SD dan administrasi penerimaan murid baru, lembaga sekolah dasar dan penyaluran pemberian subsidi / bantuan pada sekolah swasta.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, petugas operasional bidang pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pendataan gedung-gedung dan bangunan TK, SD meliputi : perpustakaanTK, SD atau yang sederajat.
- b. Pelaksana penyaluran pemeliharaan gedung pendidikan TK, SD atau yang sederajat dan bangunan perkantoran.
- c. Pelaksana penyusunan rencana alat-alat kebutuhan administrasi dan buku-buku untuk TK, SD , pembinaan generasi muda dan olah raga.
- d. Pelaksana pengelolaan administrasi perencanaan penerimaan murid baru dan penyelenggaraan lembaga TK, SD atau yang sederajat
- e. Pelaksana penyaluran pemberian subsidi / bantuan pada sekolah swasta.
- f. Pelaksana pembangunan penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral.
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

3. Petugas Operasional Bidang Kepegawaian :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Petugas operasional bidang kepegawaian mempunyai tugas pokok dalam penyiapan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai edukatif, pegawai administrasi dan pengembangan karir pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas , petugas operasional bidang kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Pelaksana penyiapan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai edukatif dan pegawai administratif.
- b. Pelaksana penyiapan pengembangan karir pegawai edukatif dan pegawai administratif.

4. Petugas Operasional Bidang Sarana dan Prasarana :

Petugas operasional bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok dalam pengelolaan sarana dan prasarana TK, SD atau yang sederajat serta inventarisasi dan penghapusan barang. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas , petugas bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana TK, SD atau yang sederajat.
- b. Pelaksana inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana TK, SD atau yang sederajat.

5. Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara professional sesuai dengan kebutuhan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari Pengawas TK, SD

6. Pengawas TK, SD :

Pengawas TK, SD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pembinaan edukatif di sekolah-sekolah. Jumlah jabatan pengawas TK, SD sebagaimana dimaksud diatas ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jenjang jabatan pengawas TK, SD sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

4.1.7 Visi Dan Misi Kantor Upt Dinas Kecamatan Labuan

1. VISI

“ Terwujudnya Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas”

2. MISI

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan
- b. Penyempurnaan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Meningkatkan Kerjasama Menyangkut Kepentingan dalam Pendidikan.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah orang tua siswa yang mendapat bantuan siswa miskin (BSM) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10 % maka jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 96 responden.

4.2.2 Karakteristik Responden

Subyek penelitian ini memiliki karakteristik secara umum yakni orang tua siswa yang mendapatkan bantuan dana BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Dalam proses pengisian kuesioner peneliti meminta responden untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data, identitas diri yang penulis cantumkan dalam lembar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

kuesioner terdiri atas jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut.

4.2.3 Jenis Kelamin

Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

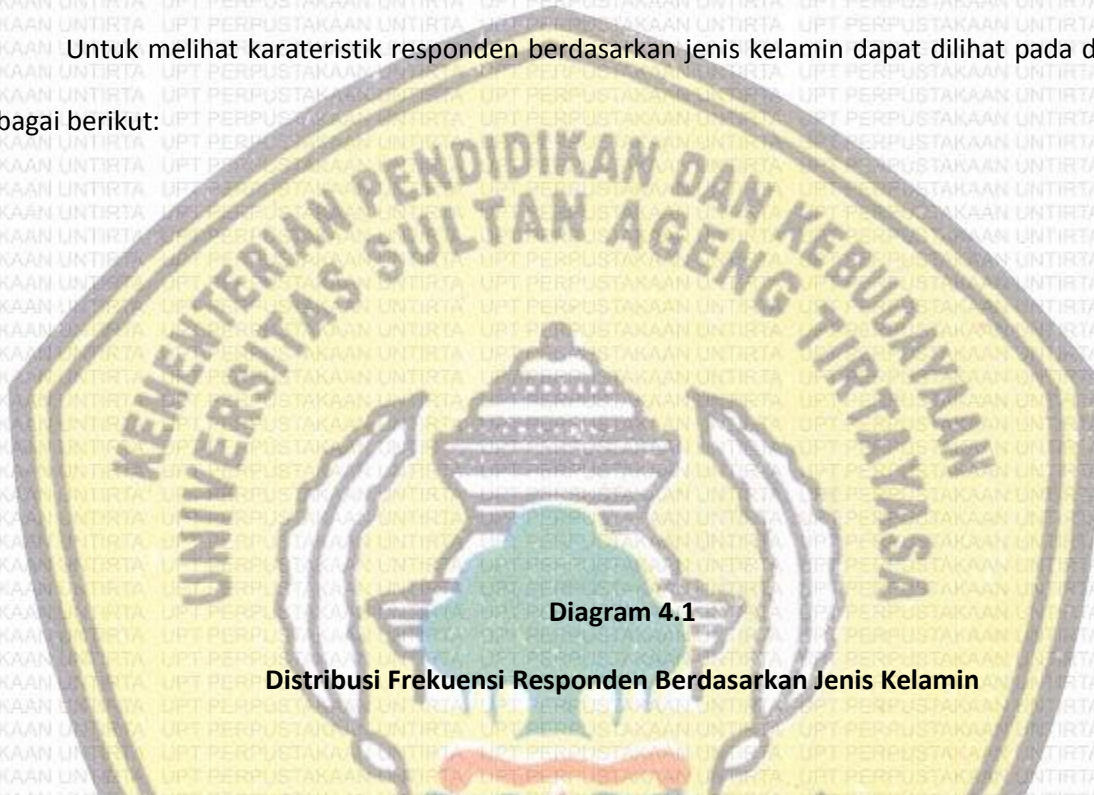
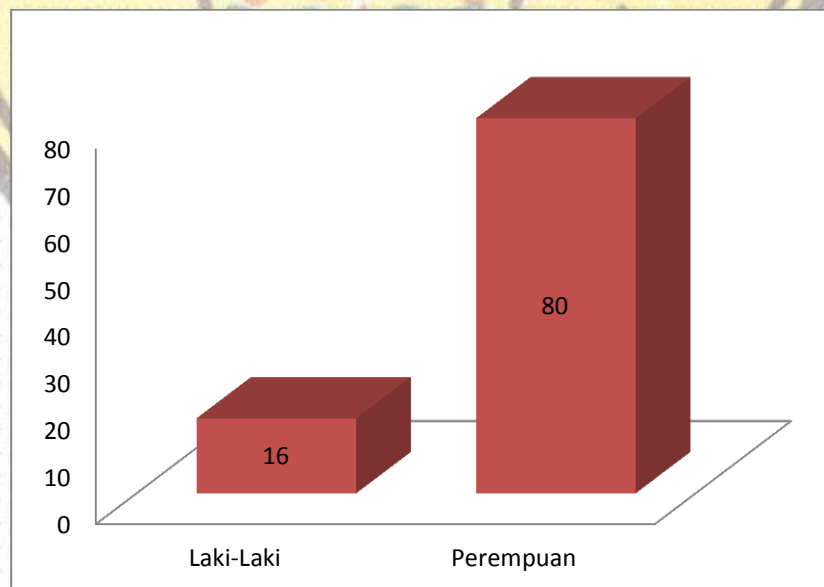


Diagram 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

PERINGATAN !!!

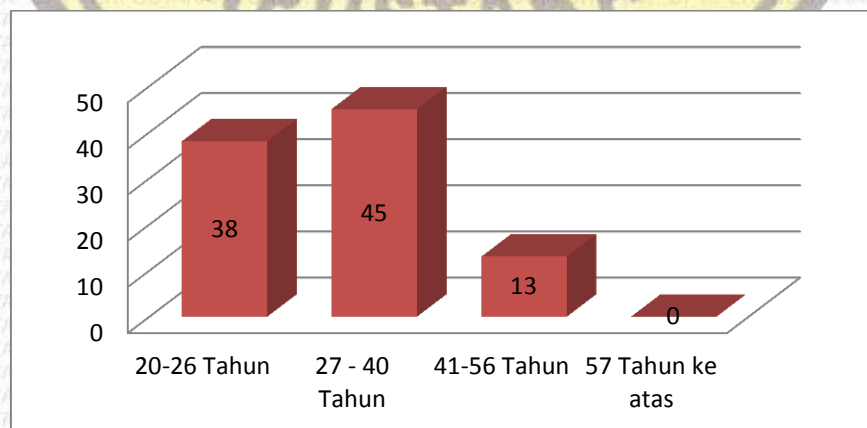
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Berdasarkan grafik 4.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih banyak Perempuan dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena sewaktu peneliti menyebarkan kuesioner responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dijumpai pada saat proses pengisian kuesioner. Selain itu, mayoritas perempuan yang tinggal di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

4.2.4 Tingkat Usia Responden

Untuk melihat secara keseluruhan, tingkat usia rata-rata responden dapat dilihat pada grafik 4.2. Data tabel menggambarkan bahwa dari 96 responden, 38 orang berusia 20 sampai 26 tahun, 45 orang berusia antara 27 sampai 40 tahun, 13 orang berusia antara 41 sampai dengan 56 tahun dan 57 tahun ke atas tidak ada. Tidak adanya responden berumur 57 tahun ke atas disebabkan pada usia tersebut responden tidak memiliki anak yang sekolah di Sekolah Dasar (SD).

Garfik 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Tingkat Umur



Sumber : Data Hasil Kuisioner 2015

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia responden terkonsentrasi pada usia 27 sampai 40 tahun atau masih dalam kategori usia produktif. Usia merupakan salah satu identitas yang dapat memberikan petunjuk untuk mengetahui kemampuan fisik dan kemampuan daya pikir seseorang. Semakin tua usia seseorang semakin tinggi tingkat kematangan berpikirnya dalam proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

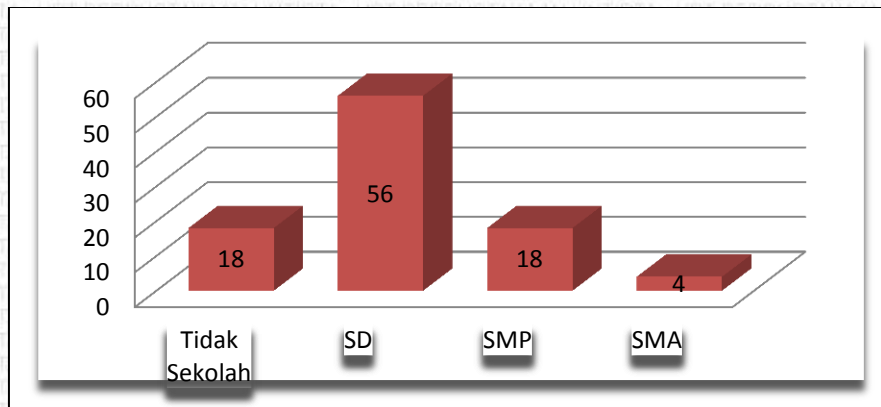
Rentang usia 27 sampai 40 tahun penulis pikir pada usia tersebut tergolong masih muda sehingga cukup memberikan penilaiannya berdasarkan keadaan pelaksanaan program BSM yang dilaksanakan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pada usia tersebut mampu memahami secara mendalam tentang maksud dari pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh peneliti pada lembar kuesioner.

4.2.5 Tingkat pendidikan

Dalam jenjang pendidikan terakhir responden, penelitian dapat menguraikan pada grafik sebagai berikut

Grafik 4.3

Distribusi Responden Menurut Jenjang Pendidikan



Sumber : Data Hasil Kuisiner, 2015

Berdasarkan grafik di atas, dapat digambarkan bahwa jumlah responden dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dan tidak Sekolah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah, sehingga dalam hal ini menyebabkan mereka masuk dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Labuan.

Tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat mengalami kesulitan mereka untuk bekerja yang layak dan memperoleh penghasilan yang lebih baik untuk membiayai kehidupan dan menyekolahkan anaknya. Dengan demikian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan sudah sangat tepat dilaksanakan mengingat kehidupan masyarakat yang tergolong kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

4.3 Penguji Persyaratan Statistik

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

4.3.1 Uji Validitas

Sebelum melakukan analisa data penulis melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Untuk mengetahui apakah angket yang di berikan kepada responden benar-benar dapat mengukur apa yang sedang diukur, maka harus dilakukan pengujian tingkat validitas (kesohihan, *validity*), jumlah angket yang diterima peneliti sebanyak 27 angket, kemudian angket yang terkumpul diperiksa dan diberi skor kemudian dilanjutkan dengan uji validitas instrument.

Uji validitas yang dihitung dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dengan Dengan ketentuan kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 5 % atau r tabel adalah 0,202 yaitu jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka instrument pernyataan-pernyataan kuesioner berkorelasi terhadap skor total dinyatakan valid, dan jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (0,227) maka pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tidak valid.

Adapun hasi dari pengujian validitas Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS *for Windows release 20.0* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas
(Impelementasi Program BSM)

No	No Item Pertanyaan	Nilai Korelasi (r hitung)	Taraf Signifikan (r tabel)	Keterangan
1	Item 1	0.531	0.202	Valid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

2	Item 2	0.288	0.202	Valid
3	Item 3	0.510	0.202	Valid
4	Item 4	0.124	0.202	Tidak Valid
5	Item 5	0.489	0.202	Valid
6	Item 6	0.346	0.202	Valid
7	Item 7	0.144	0.202	Tidak Valid
8	Item 8	0.321	0.202	Valid
9	Item 9	0.502	0.202	Valid
10	Item 10	0.054	0.202	Tidak Valid
11	Item 11	0.321	0.202	Valid
12	Item 12	0.164	0.202	Tidak Valid
13	Item 13	0.520	0.202	Valid
14	Item 14	0.343	0.202	Valid
15	Item 15	0.329	0.202	Valid
16	Item 16	-0.03	0.202	Tidak Valid
17	Item 17	0.433	0.202	Valid
18	Item 18	0.037	0.202	Tidak Valid
19	Item 19	0.320	0.202	Valid
20	Item 20	0.688	0.202	Valid
21	Item 21	0.621	0.202	Valid
22	Item 22	0.368	0.202	Valid
23	Item 23	0.341	0.202	Valid
24	Item 24	0.156	0.202	Tidak Valid
25	Item 25	0.157	0.202	Tidak Valid

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

26	Item 26	0.416	0.202	Valid
27	Item 27	0.323	0.202	Valid

Sumber Hasil : pengolahan data SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat delapan instrumen yang dinyatakan tidak valid yaitu butir instrumen nomor 4, 7, 10, 12, 16, 18, 24 dan 25. Hal tersebut dibuktikan karena nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$. Artinya ke delapan butir pernyataan tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat terukur dengan butir instrumen lainnya.

4.3.2 Uji Reabilitas

Setelah diuji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas yaitu berhubungan dengan masalah ketepatan dari suatu data, sedangkan untuk pengujian reliabilitas melalui nilai koefisien alpha dengan dibandingkan nilai 0,60. Konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai alpha diatas 0,60 dan sebaliknya.

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas
(Implementasi Program BSM)

Cronbach's Alpha	N of Items
.657	27

Sumber Hasil Pengolahan Spss v.20.0 Tahun 2015

Nilai koefisien reliabilitas variabel implementasi program BSM-SD setelah melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 20 di dapatkan hasil untuk adalah 0,657. Sesuai kriteria, nilai ini sudah lebih besar dari 0,60, maka hasil data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil angket variabel dapat dipercaya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Dengan demikian dapat disimpulkan, nilai ini sudah lebih besar dari 0,60, maka hasil data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain data hasil penelitian menunjukkan bahwa kuesioner penelitian reliabel.

4.4 Analisa Data

Jenis dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk kalimat (pernyataan) dari hasil wawancara dan pernyataan dari hasil kuesioner, melainkan ditampilkan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian diolah. Pada penelitian ini peneliti cenderung mengacu pada teori implementasi dari Edward III karena tujuan dari penelitian ini adalah implemetansi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, dalam teori tersebut dikemukakan ada 4 indikator yang akan diuraikan dalam kuesioner. Diantaranya yaitu :komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala *Likert*, dengan mengajukan 4 pilihan jawaban yang memiliki bobot nilai berbeda. Adapun pilihan jawabannya yaitu sangat setuju (bernilai 4), setuju (bernilai 3), tidak setuju (bernilai 2), dan sangat tidak setuju (bernilai 1). Maka semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesioner maka semakin baik pula implementasi program bantuan siswa miskin sekolah dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Untuk menjelaskan lebih dalam, maka peneliti menjelaskan di bawah ini mengenai pemaparan Implementasi Program BSM-SD, terkait dengan keempat indicator dari teori yang telah dirumuskan sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.

4.4.1 Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi diartikan dengan keberhasilan implementasi masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Gambaran hasil penelitian ini dilakukan melalui data kualitatif yang dikuantifikasi berdasarkan data hasil jawaban kuesioner dari 96 responden menurut Skala Likert. Hasil jawaban diberi skor pembobotan (nilai 1, yang paling rendah, sampai dengan nilai 4, yang paling tinggi).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menggunakan teori Edward III, dalam teori tersebut Edward III mengemukakan empat indikator yang diuraikan dalam kuesioner. Diantaranya yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil perhitungan dan analisis terhadap masing-masing indikator penelitian dijelaskan di bawah ini.

4.4.1 Komunikasi Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Siswa

Miskin (BSM)

Pertanyaan ke-1 pada kuesioner yaitu mengenai Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Pandeglang. Didapatkan data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

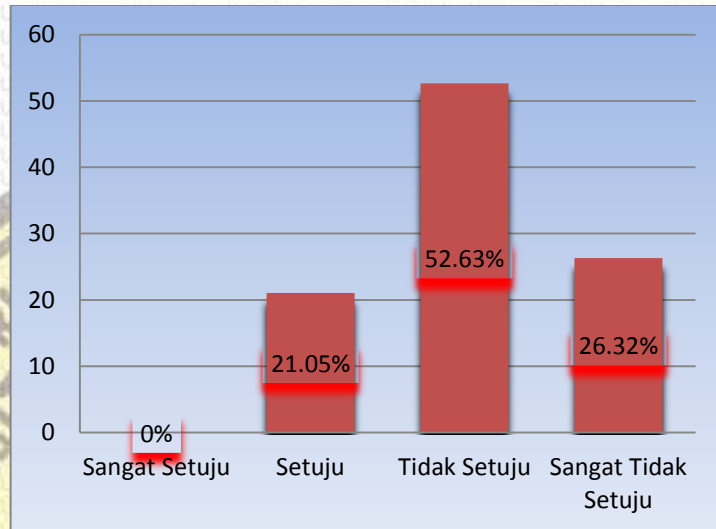
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Grafik 4.4

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Telah Disosialisasikan Kepada Seluruh Masyarakat Yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Di Kabupaten Pandeglang



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju mengenai pernyataan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kecamatan Labuan mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga dalam pelaksanaannya uang yang diterima oleh setiap masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan rumah orang tua siswa.

PERINGATAN !!!

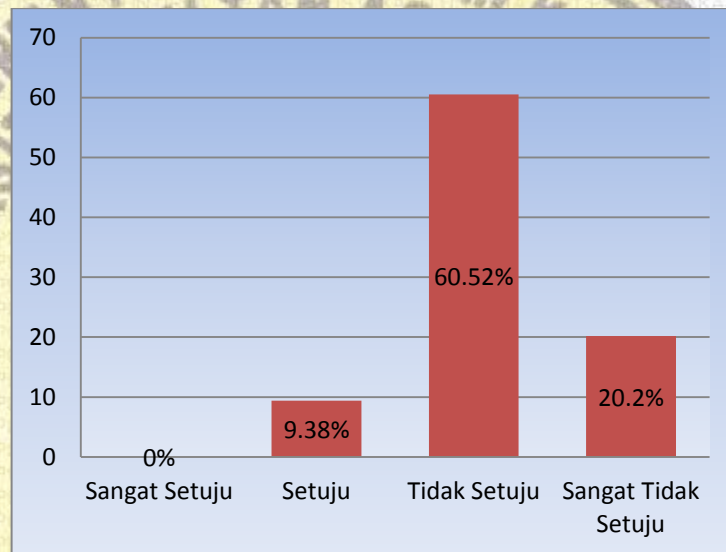
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pernyataan ke-2 pada kuesioner mengenai bapak/ibu sudah mengetahui tujuan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Didapatkan data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.5
Tujuan Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju mengenai pernyataan bapak/ibu sudah mengetahui tujuan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh pemerintah. penggunaan keuangan bantuan oleh para siswa penerima. Yang artinya mayoritas di Kecamatan Labuan belum sepenuhnya mengetahui tujuan dari adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini. akibatnya uang bantuan BSM yang diterima secara langsung oleh para siswa berpotensi disalahgunakan oleh penerima bantuan seperti untuk membeli kebutuhan yang tidak urgen misalnya handphone, pulsa atau membeli

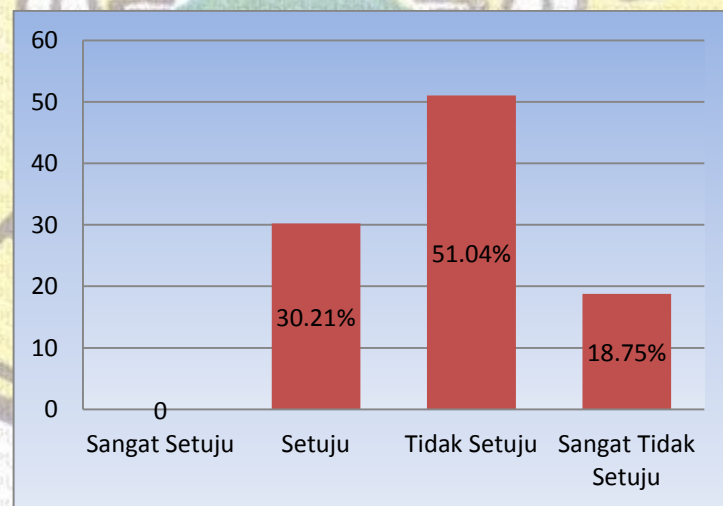
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

barang lainnya yang tidak menjawab kebutuhan riil para siswa miskin. Untuk itu, diharapkan agar BSM yang disalurkan kepada para siswa hendaknya dapat membantu meringankan beban orang tua dan pendidikan anak-anak sekolah. Maka, orang tua dan guru juga perlu mengontrol keuangan yang diterima oleh siswa.

Pernyataan ke-3 pada kuesioner yaitu mengenai masyarakat miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari program BSM (Bantuan Siswa Miskin). Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.6
Cara Mendapatkan Dana Bantuan Dari Program BSM
(Bantuan Siswa Miskin)



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan masyarakat miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari program BSM (Bantuan Siswa Miskin). Hal ini disebabkan

PERINGATAN !!!

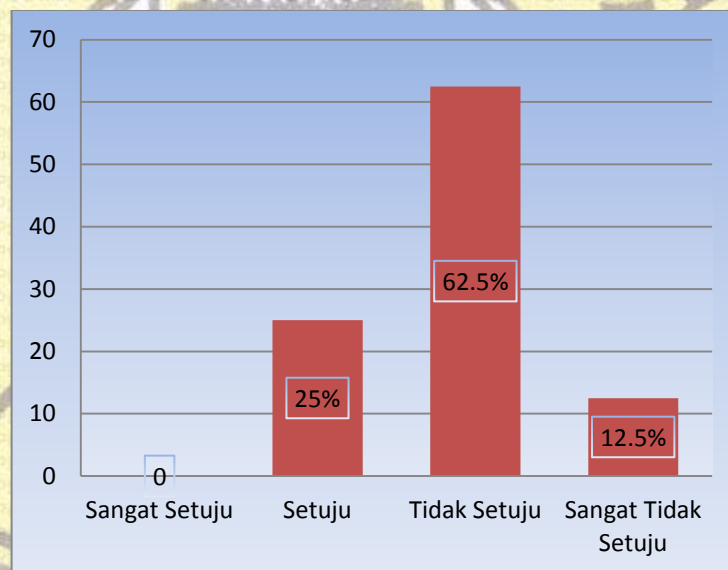
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

petugas pelaksana program belum mensosialisasikan mekanisme untuk mendapatkan bantuan BSM kepada masyarakat.

4.4.2 Kejelasan Informasi Yang Diberikan Pelaksana Kebijakan

Pernyataan ke-5 pada kuesioner mengenai sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai program BSM (Bantuan Siswa Miskin) dapat dimengerti oleh orang tua siswa. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.7
Sosialisasi Yang Diberikan Oleh Pihak Sekolah Mengenai Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) Dapat Dimengerti Oleh Orang Tua Siswa



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju atas pernyataan sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai program BSM (Bantuan Siswa Miskin) dapat dimengerti oleh orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh petugas ketika

PERINGATAN !!!

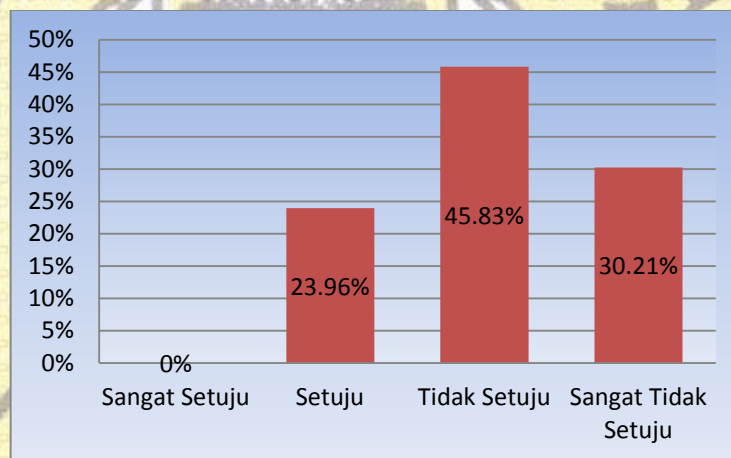
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima dana BSM tidak dapat di pahami oleh orang tua siswa penerima dana bantuan BSM.

Pernyataan ke-6 pada kuesioner membahas mengenai Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan informasi kepada orang tua yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.8
Pemerintah Kabupaten Pandeglang Telah Memberikan Informasi Kepada Orang Tua Yang Memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Untuk Mendaftarkan Anaknya Sekolah



Sumber : Data Hasil Kuisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.8 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab tidak setuju atas pernyataan mengenai Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan informasi kepada orang tua yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mendaftarkan anaknya belum memberikan informasi secara merata kepada masyarakat yang menerima Kartu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mendaftarkan anaknya besekolah dengan tujuan anak usia sekolah dari rumah tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah,

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

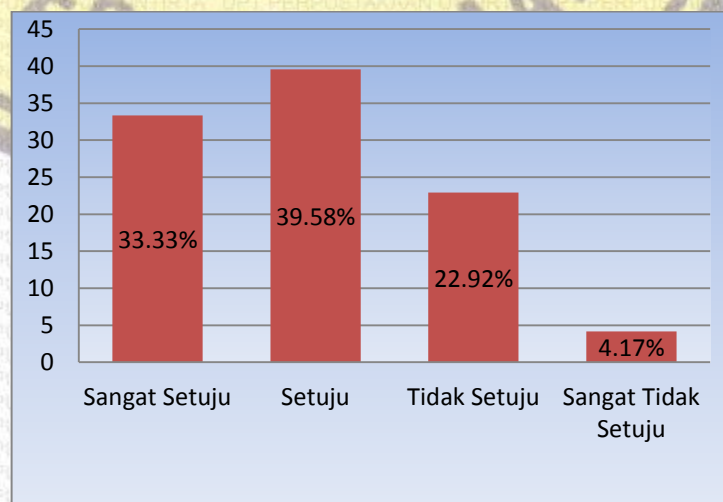
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Hal ini menyebabkan masih banyaknya anak di Kecamatan Labuan yang tidak sekolah atau putus sekolah.

4.4.3 Adanya Dukungan Dari Sumber Daya Manusia Yang Handal

Pernyataan ke-8 pada kuesioner membahas mengenai jumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kecamatan Labuan sudah mencukupi. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.9
Jumlah Petugas Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Di Kecamatan Labuan



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

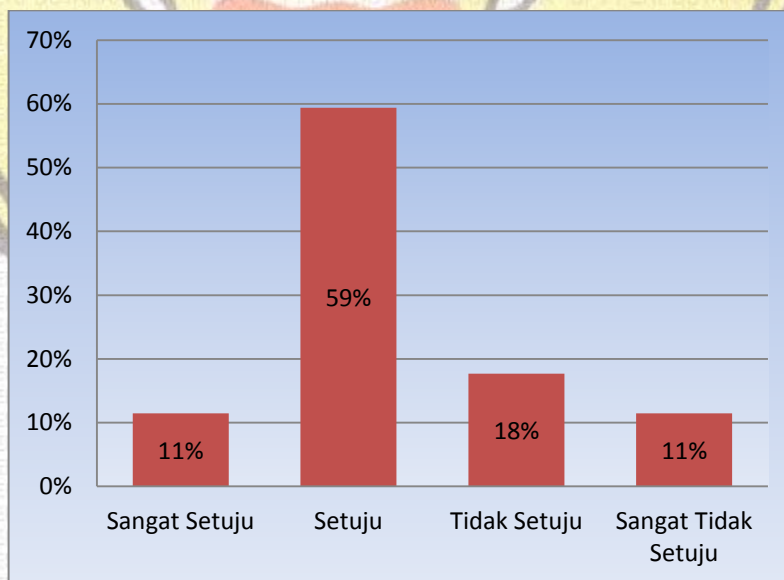
PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.9 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan mengenai jumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kecamatan Labuan sudah mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah petugas di UPT Kecamatan Labuan dalam menjalankan program Bantuan Siswa Miskin sudah mencukupi, karena orang tua siswa penerima dana BSM beranggapan dari awal pendaftaran yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai pada proses pencairan dana di kantor pos sudah ada petugas yang melayani mereka.

Pernyataan ke-9 pada kuesioner membahas mengenai petugas pelaksana program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah di Kecamatan Labuan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.10
Kemampuan Petugas Dalam Melaksanakan Program BSM



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

PERINGATAN !!!

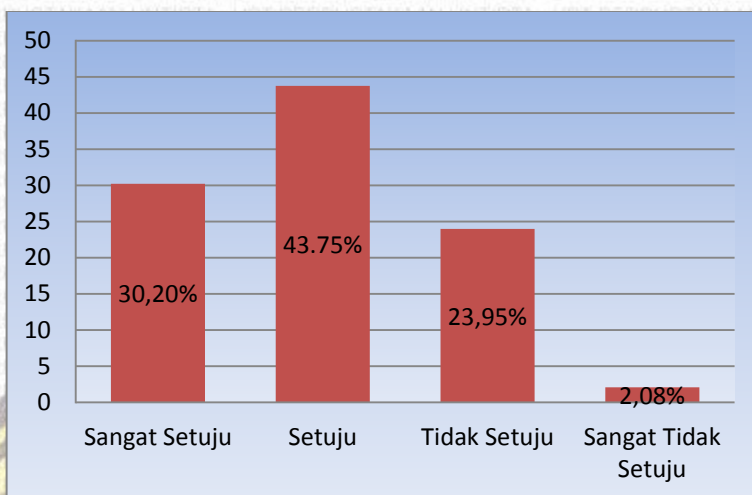
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.10 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan mengenai petugas pelaksana program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah di Kecamatan Labuan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang artinya adalah pihak pelaksana program BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan seperti guru dan Kepala Sekolah di mana mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab program BSM, dan guru sebagai pelaksana program bertugas dalam memilah calon siswa penerima BSM, dan mendata siswa yang mendapat BSM dengan baik.

4.4.4 Tersedianya Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Pernyataan ke-11 pada kuesioner membahas mengenai pelaksanaan program BSM telah dapat memecahkan permasalahan pendidikan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

**Grafik 4.11
Pelaksanaan Program BSM Dapat Memecahkan Permasalahan Pendidikan Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang**



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.11 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan pelaksanaan program BSM telah dapat memecahkan permasalahan pendidikan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Hal ini membuktikan responden dalam penelitian ini mendukung akan diimplementasikannya program BSM. Program BSM ini sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memperoleh pelayanan pendidikan sehingga orang tua siswa miskin dapat menyelesaikan pendidikan anaknya hingga lulus SMA ataupun perguruan tinggi dengan prestasi yang memuaskan.

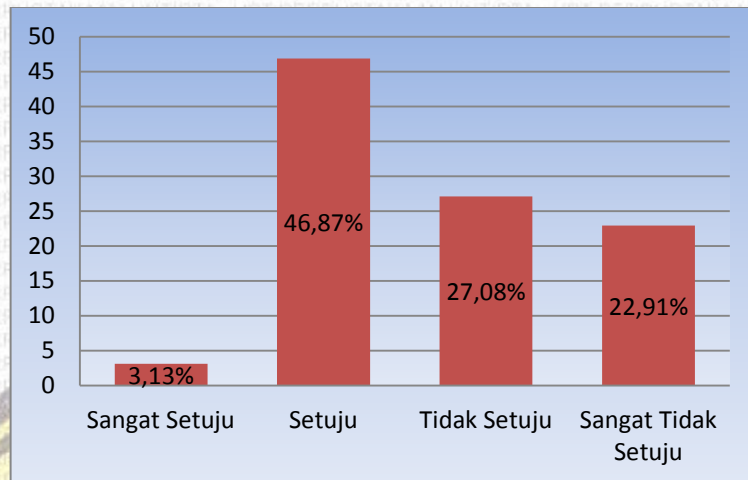
4.4.5 Sikap Petugas Dalam Menjalankan Kebijakan

Pernyataan ke-13 pada kuesioner membahas mengenai aparat/petugas BSM dalam hal ini pegawai Kantor Pos sebagai tempat penyaluran dana BSM telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penerima manfaat dana BSM di Kecamatan Labuan. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.12
Pelayanan Yang Diberikan Kepada Penerima Dana BSM

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

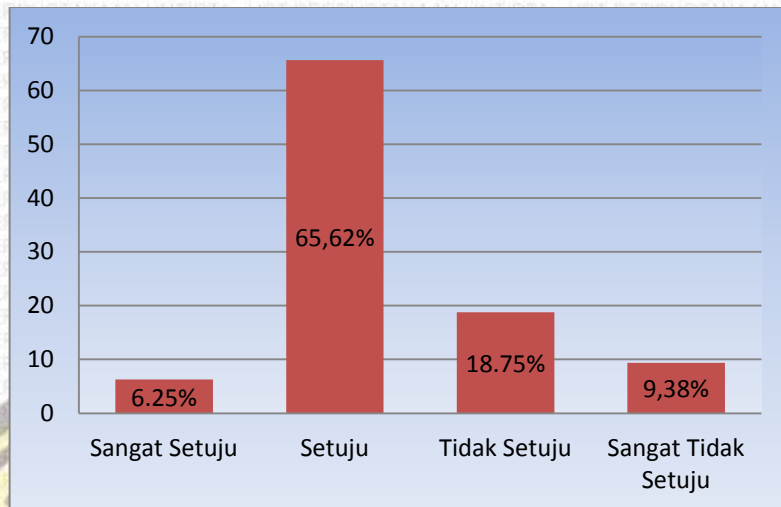
Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju bahwasannya aparatur/petugas BSM dalam hal ini pegawai Kantor Pos sebagai tempat penyaluran dana BSM telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penerima manfaat dana BSM di Kecamatan Labuan . Hal ini disebabkan karena pada saat pembagian dana BSM di Kantor Pos Kecamatan Labuan mereka diberikan fasilitas tempat duduk, nomor antrian yang menyebabkan mereka tidak berdesak-desakan pada saat akan mengambil dana BSM tersebut.

Pernyataan ke-14 pada kuesioner membahas mengenai kepala sekolah dan komite sekolah selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat miskin di Kecamatan Labuan. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.13 **Kepala Sekolah Dan Komite Sekolah Selalu Tanggap Terhadap Keluhan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Labuan**

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

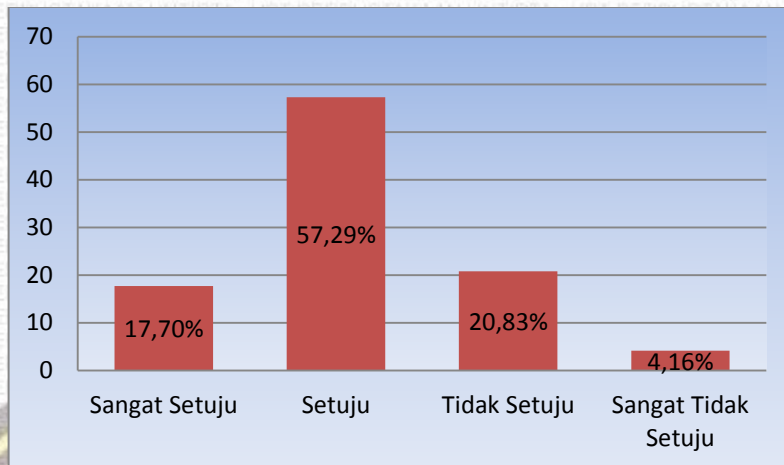
Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.13 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab tidak setuju bahwasannya kepala sekolah dan komite sekolah selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat miskin di Kecamatan Labuan. Hal ini membuktikan mayoritas responden dalam penelitian menyatakan bahwa kepala sekolah dan komite sekolah selalu tanggap terhadap keluhan-keluhan dalam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Pernyataan ke-15 pada kuesioner membahas mengenai orang tua siswa menerima dana Bantuan Siswa Miskin sebesar Rp. 450.000 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.14
Orang Tua Siswa Menerima Dana Bantuan Siswa Miskin Sebesar Rp. 450.000 Sesuai Dengan Peraturan Yang Telah Ditetapkan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



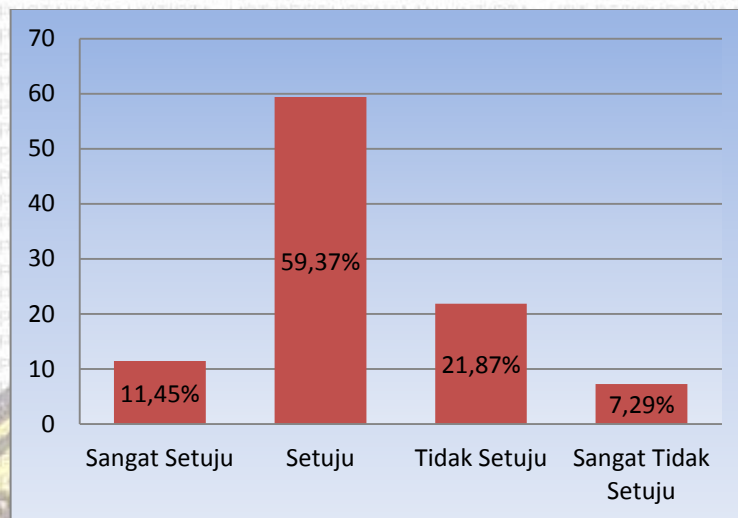
Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.14 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju mengenai pernyataan orang tua siswa menerima dana Bantuan Siswa Miskin sebesar Rp. 450.000 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan jumlah uang yang diterima oleh setiap siswa telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang artinya komite sekolah dan jajarannya telah melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin dengan baik dalam menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini kepada siswa miskin.

4.4.6 Penilaian Masyarakat Terhadap Program BSM

Pernyataan ke-17 pada kuesioner membahas mengenai jumlah dana yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan siswa miskin. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.15
Jumlah Dana Yang Diberikan Mampu Memenuhi
Kebutuhan Siswa Miskin



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.15 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju bahwasannya jumlah dana dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 450.000/siswa telah mampu memenuhi kebutuhan siswa miskin yang ada di UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan seperti alat tulis, buku-buku, seragam, dan alat transportasi untuk menempuh jarak antara rumah dan sekolah.

4.4.7 Para Petugas Menjalankan Tupoksi Sesuai Dengan Pedoman

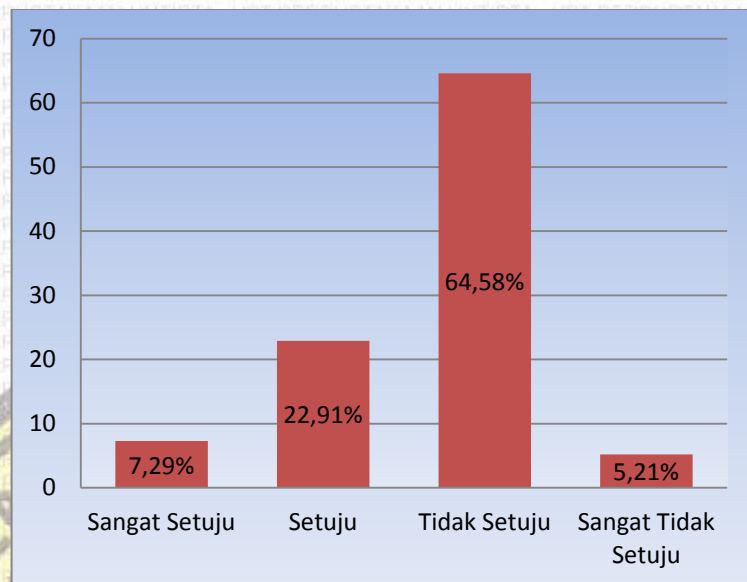
Pernyataan ke-19 pada kuesioner membahas mengenai pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sering melakukan evaluasi secara rutin terhadap masyarakat yang menerima bantuan BSM. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.16
Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan Sering Melakukan Evaluasi Secara Rutin Terhadap Masyarakat Yang Menerima

Bantuan BSM

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.16 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab tidak setuju atas pernyataan pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sering melakukan evaluasi secara rutin terhadap masyarakat yang menerima bantuan BSM. Hal ini membuktikan tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap jalannya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan, sehingga menyebabkan masih adanya orang tua siswa miskin belum mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Belum optimalnya evaluasi terhadap jalannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di UPT Kecamatan Labuan disebabkan karena keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dan kekurangan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dibidang pelaksanaan BSM Kabupaten Pandeglang.

PERINGATAN !!!

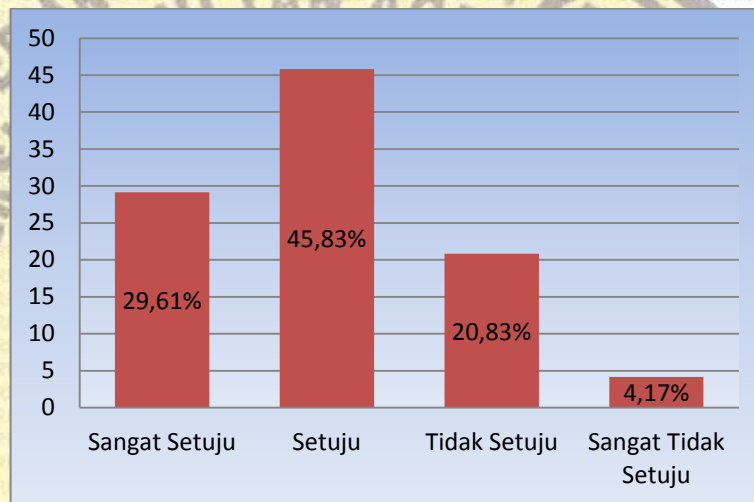
1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pernyataan ke-20 pada kuesioner membahas mengenai pegawai UPT

Pendidikan Kecamatan Labuan sudah melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.17

Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan Sudah Melaksanakan Tugas Nya Dengan Sebaik-Baiknya



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.17 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sudah melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya. Hal ini membuktikan petugas sudah menjalankan implementasi program BSM sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

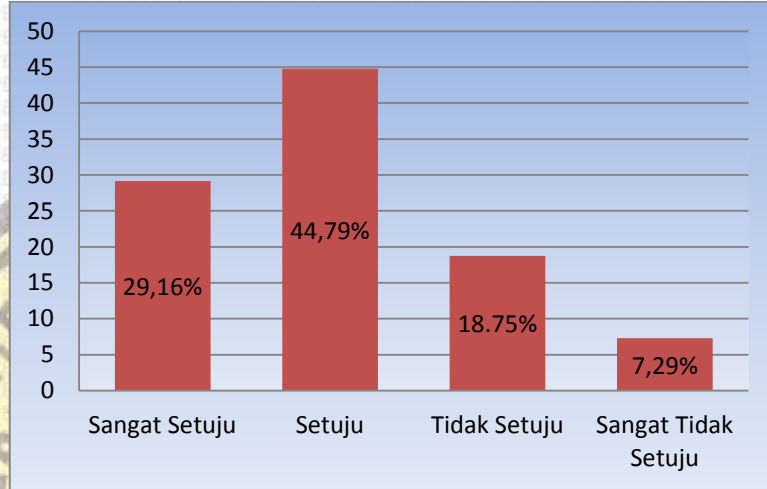
Pernyataan ke-21 pada kuesioner membahas mengenai bapak/ibu selalu mendapatkan pelayanan yang baik pada saat penyaluran dana BSM. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Grafik 4.18

Penerima Dana BSM Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Pada Saat Penyaluran Dana BSM



Sumber : Data Hasil Kuisiner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.18 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan bapak/ibu selalu mendapatkan pelayanan yang baik pada saat penyaluran dana BSM. Hal ini membuktikan repon orang tua siswa terhadap pelayanan yang diberikan petugas pelaksana program BSM sudah memuaskan.

4.4.8 Adanya Pembagian Tugas Yang Jelas

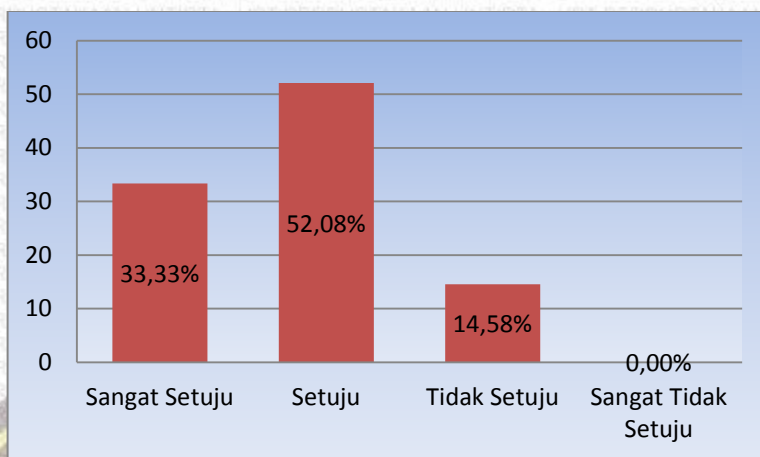
Pernyataan ke-22 pada kuesioner membahas mengenai adanya pembagian kerja yang jelas petugas pelaksana program BSM di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.19

Adanya Pembagian Kerja Yang Jelas Petugas Pelaksana Program BSM Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.19 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan adanya pembagian kerja yang jelas petugas pelaksana program BSM di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. Hal ini membuktikan respon orang tua siswa terhadap pembagian kerja petugas dalam mengimplementasikan program BSM sudah jelas.

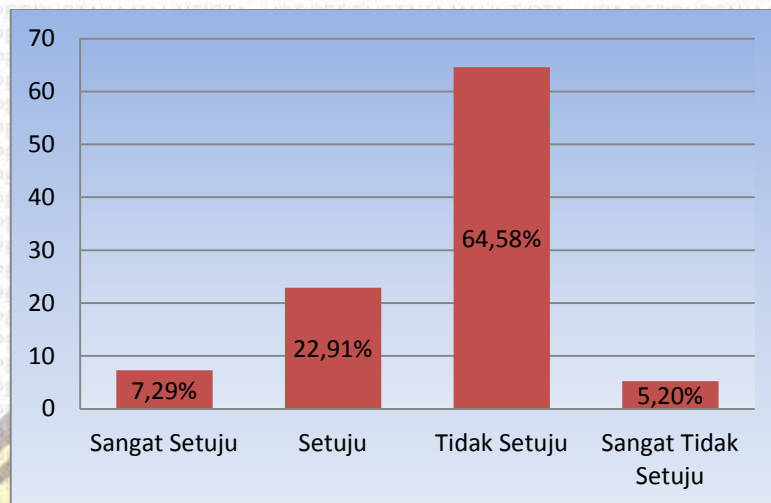
Pernyataan ke-23 pada kuesioner membahas mengenai pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan selalu melakukan monitoring secara berkala demi tercapainya tujuan BSM. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Grafik 4.20

Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan Selalu Melakukan Monitoring Secara Berkala Demi Tercapainya Tujuan BSM

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



Sumber : Data Hasil Kuisiner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.20 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab tidak setuju atas pernyataan pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan selalu melakukan monitoring secara berkala demi tercapainya tujuan BSM. Hal ini membuktikan petugas program BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan belum melakukan monitoring terhadap jalannya program BSM.

Tidak efektifnya petugas dalam melakukan monitoring disebabkan karena program belum didukung sumberdaya finansial yang memadai untuk melakukan evaluasi dan monitoring program. Padahal jika dilihat dari buku juknis program BSM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan program disebutkan bahwa biaya yang timbul akibat pelaksanaan program BSM dibebankan oleh APBN dan APBD.

4.4.9 Adanya Tanggung Jawab Petugas Dalam Menjalankan Kebijakan

Pernyataan ke-26 pada kuesioner membahas mengenai mengenai Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan dana BSM kepada siswa yang

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

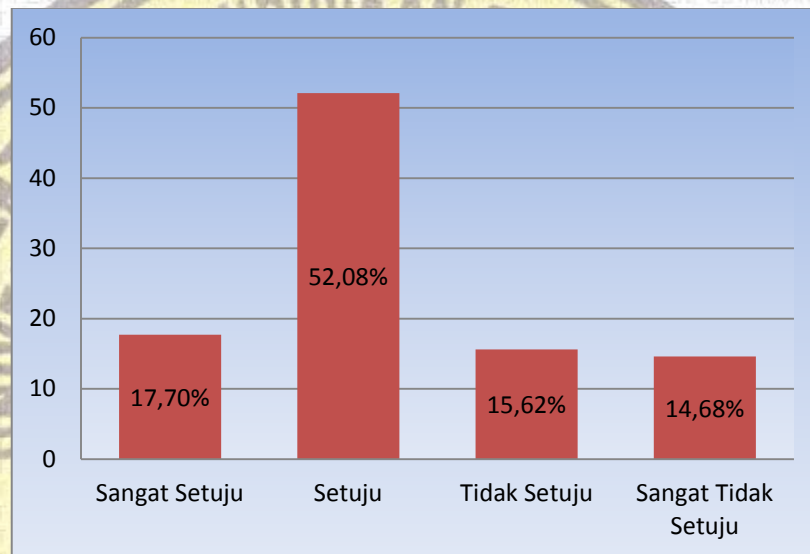
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

ekonomi orang tuanya miskin. Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut

:

Grafik 4.21

**Pemerintah Kabupaten Pandeglang Telah Memberikan Dana BSM Kepada Siswa Yang
Ekonomi Orang Tuanya Miskin**



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.21 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan dana BSM kepada siswa yang ekonomi orang tuanya miskin. Hal ini membuktikan bahwa kepala sekolah telah memberikan dana bantuan siswa miskin kepada siswa yang benar-benar orang tuanya tidak mampu.

Pernyataan ke-27 pada kuesioner membahas mengenai bapak/ibu Menerima dana BSM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dua kali dalam smester.

Diperoleh data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

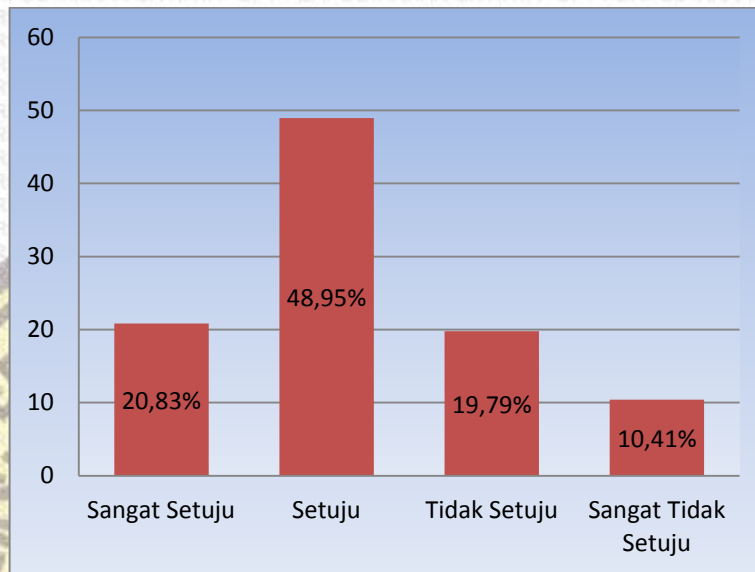
Grafik 4.22

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Penyaluran Dana BSM Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditetapkan



Sumber : Data Hasil Kuisisioner, 2015

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam grafik 4.22 menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab setuju atas pernyataan bapak/ibu menerima dana BSM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dua kali dalam semester. Hal ini membuktikan waktu penyaluran dana BSM di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis BSM.

4.5 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut : **“Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Paling Tinggi Atau Sama Dengan 60 % Dari Nilai Ideal.”**. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang penulis ajukan pada pab sebelumnya.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus t-tes satu sampel. Adapun hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Skor ideal untuk Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD)

Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah $4 \times 19 \times 96 = 7296$ (4 = nilai dari jawaban selalu setiap pertanyaan/ Pernyataan yang dinyatakan kepada responden, kriteria skor pada skala likert. 19 = jumlah pertanyaan/ pernyataan yang diberikan kepada responden, sedangkan 96 = jumlah sampel yang dijadikan responden. Sedangkan untuk skor penelitian (lihat lampiran tabulasi data) diperoleh hasil sebesar 4724, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah $4724 : 7296 = 0.65$ maka dalam bentuk persentase menjadi 65 %.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang tercapai 65 % melebihi dari yang diharapkan 60%.

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan uji t-test satu sampel.

Skor ideal untuk Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah $4 \times 19 \times 96 = 7296$ (4 = nilai dari jawaban selalu setiap pertanyaan/ pernyataan yang dinyatakan kepada responden, kriteria skor pada skala likert. 19 = jumlah pertanyaan/ pernyataan yang diberikan kepada responden, sedangkan 96 = jumlah sampel yang dijadikan responden). dan nilai mean/ nilai rata-ratanya adalah $7296:96 = 76$. Sehingga untuk Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

(BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang terendah mencapai

60% dari skor ideal, ini berarti bahwa $60\% = 0.60 \times 76 = 45.6$

Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih besar atau sama dengan 60% dari skor ideal. sedangkan H_a lebih besar dari skor ideal/dari yang diharapkan.

$$H_0 = \mu \geq 60\% \geq 0.60 \times 76 = 45.6$$

$$H_a = \mu < 60\% < 0.60 \times 76 = 45.6$$

Pengujian hipotesis menggunakan rumus uji t-test satu sampel dengan uji pihak kanan adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$\bar{x} = \frac{4724}{96} = 49.21$$

$$\mu_0 = 0.60 \times 7296 : 96 = 64.8$$

$$s = 6.096$$

ditanya $t = ?$

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{49.21 - 45.6}{\frac{6.096}{\sqrt{96}}}$$

$$t = \frac{3.61}{6.096}$$

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

$$t = \frac{3.61}{\frac{6.096}{9.79}}$$

$$t = \frac{3.61}{0.623}$$

$$t = 5.795$$

Harga t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = $n-1$,

maka $(96-1=95)$ dan taraf kesalahan 5 %, untuk uji satu pihak (*one tail test*) dengan uji pihak

kanan. Berdasarkan dk 95 dan taraf kesalahan sebesar 5 %, ternyata diperoleh t_{tabel} untuk uji satu

pihak sebesar 1.664, karena harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau jatuh dari penerimaan H_a

$(5.795 > 1.664)$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ditemukan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa

Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten

Pandeglang yaitu :

$$\text{Implementasi BSM} = \frac{4724}{7296} \times 100 \% = 64.75\%$$

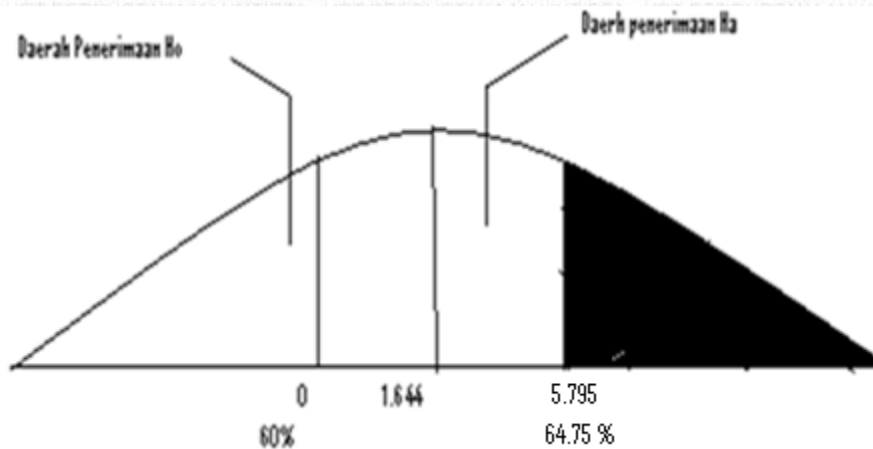
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin

Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

adalah sebesar 64.75 persen

Gambar 4.1

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis



4.6 Interpretasi Data

Interpretasi dari penelitian yang berjudul Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang memiliki hal yang utama yaitu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian sebagai hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian adalah “Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?”

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari masalah tersebut. Langkah *pertama* yaitu dengan menggunakan rumus uji t test satu sampel dengan uji satu pihak (*one tail test*) dengan uji pihak kanan bahwa harga t_{hitung} lebih besar ($>$) dari harga t_{tabel} . Maka, hal ini dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena mencapai angka 64.75 persen.

Langkah *kedua* yaitu menentukan skor ideal dan menghitung skor penelitian. Skor ideal adalah $4 \times 19 \times 96 = 7296$ ($4 =$ nilai dari jawaban selalu setiap pertanyaan/pernyataan yang dinyatakan kepada responden, kriteria skor pada skala likert).

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

19 = jumlah pertanyaan/ Pernyataan yang diberikan kepada responden, sedangkan 96 = jumlah sampel yang dijadikan responden.. Sedangkan untuk skor penelitian (lihat lampiran tabulasi data) diperoleh hasil sebesar 4724, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah $4724 : 7296 = 0.6475$ maka dalam bentuk persentase menjadi 64.75%. Hal ini berarti bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan baik. Dimana persentase hasil penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Skor Hasil Penelitian

No	Nilai	Penjelasan
1	1%-25%	Tidak Baik
2	26% - 50 %	Kurang Baik
3	51 % - 75%	Baik
4	76% - 100%	Sangat Baik

Sumber : Pengolahan data 2015

Berdasarkan tabel di atas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang adalah 64.75%, artinya Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik.

4.7 Pembahasan

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/ diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memberikan pemaparan tentang pengujian hipotesis. Dimana di dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol (H_0) di tolak dan Hipotesis kerja (H_a) diterima. Hasil ini memberikan arti bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah mencapai 64.75 persen. Hal ini menandakan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik.

Hasil perolehan nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner oleh peneliti. Skor ideal instrument adalah $4 \times 19 \times 96 = 7296$ (4 = nilai dari jawaban selalu setiap pertanyaan/pernyataan yang dinyatakan kepada responden, kriteria skor pada skala likert. 19 = jumlah pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden, sedangkan 96 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Hasil penyebaran kuesioner pada saat pengumpulan data adalah $4724 : 7296 = 0.6475$ maka dalam bentuk persentase menjadi 64.75%.

Selanjutnya peneliti melihat kembali skor hasil perhitungan tiap-tiap indikator Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang dikaitkan dengan teori Edward III. Menurut Edward III dalam Nugroho, ada empat indikator untuk mengetahui implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun hasil perhitungan tiap-tiap indikator implementasi kebijakan publik adalah: *pertama*, indikator komunikasi terdiri dari 5 butir pernyataan yaitu no. 1,2,3,4,5. Jumlah nilai butir tersebut (tabel hasil kuesioner) $203+172+203+204+186 = 968$. Skor

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

idealnya $4 \times 96 \times 5 = 1920$ ($4 =$ nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, kriteria penilaian ini adalah berdasarkan pada skala *likert*; $96 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; $5 =$ jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari indikator komunikasi $= 968 : 1920$ atau (dikali 100%) menjadi 50 %. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pandeglang kurang melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat miskin di Kecamatan Labuan yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan masih banyak masyarakat miskin yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum menikmati program BSM sehingga belum mendaftarkan anaknya ke sekolah. Selain itu, belum optimalnya sosialisasi dari petugas menyebabkan ketidakjelasan masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kecamatan Labuan mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat belum mengetahui tujuan dari program BSM, mekanisme atau alur untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM), sehingga uang yang diterima oleh setiap masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan rumah orang tua siswa.

Kedua, indikator sumber daya terdiri dari 3 butir pernyataan yaitu no. 6,7,8

Jumlah nilai butir tersebut (tabel hasil kuesioner) $290+260+290 = 840$. Skor idealnya $4 \times 96 \times 3 = 1152$ ($4 =$ nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, kriteria penilaian ini adalah berdasarkan pada skala *likert*; $96 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; $3 =$ jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari indikator komunikasi $= 840$:

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

1152 atau (dikali 100%) menjadi 73% %. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang tersedia dalam implementasi BSM sudah mencukupi, karena orang tua siswa penerima dana BSM beranggapan dari awal pendaftaran yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai pada proses pencairan dana di kantor pos sudah ada petugas yang melayani mereka.

Ketiga, indikator Disposisi terdiri dari 4 butir pernyataan yaitu no. 9,10,11,12.

Jumlah nilai butir tersebut (tabel hasil kuesioner) $243+258+277+264 = 1042$. Skor idealnya $4 \times 96 \times 4 = 1536$ (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, kriteria penilaian ini adalah berdasarkan pada skala *likert*; 96 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 4 = jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari indikator komunikasi = $1042 : 1536$ atau (dikali 100%) menjadi 68%, yang artinya indikator disposisi implementasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan sudah baik. Akan tetapi perolehan nilai persentase tersebut belum mencapai nilai optimal, dikarenakan masih adanya anggapan sebagian dari masyarakat bahwa jumlah dana BSM Rp. 450.000 yang diberikan kepada orang tua siswa miskin belum mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk keperluan sekolah, sehingga perlu dilakukan kajian ulang supaya dana BSM yang akan disalurkan selanjutnya bisa memenuhi semua kebutuhan siswa-siswa yang tidak mampu serta pelaksanaan jauh lebih optimal dan efektif sehingga program BSM bisa dirasakan oleh siswa miskin dan rentang miskin sehingga mereka bisa tetap melanjutkan sekolah sesuai dengan program kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan pendidikan sembilan tahun.

Keempat, indikator struktur birokrasi terdiri dari 7 butir pernyataan yaitu no.

19,20,21,22,23,26,27. Jumlah nilai butir tersebut (tabel hasil kuesioner)

$223+288+284+306+242+262+269 = 1874$. Skor idealnya $4 \times 96 \times 7 = 2688$ ($4 =$ nilai tertinggi dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden, kriteria penilaian ini adalah berdasarkan pada skala *likert*; $96 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; $4 =$ jumlah pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari indikator komunikasi = $1874: 2688$ atau (dikali 100%) menjadi 70 %. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dari pelaksana kebijakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) telah dijalankan dengan baik. seperti guru dan Kepala Sekolah di mana mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab program BSM, dan guru sebagai pelaksana program bertugas dalam memilah calon siswa penerima BSM, dan mendata siswa yang mendapat BSM.

Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan perhitungan tiap-tiap indikator pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prosentase Hasil Perhitungan Perindikator

Indikator	Skor Aktual Perindikator	Item pertanyaan Perindikator	Rata-Rata	Skor Ideal Tiap Indikator	Prosentase
Komunikasi	968	5	193.60	1920	$0.5042 \times 100\% = 50\%$
Sumber Daya	840	3	280.00	1152	$0.7292 \times 100\% = 73\%$
Disposisi	1042	4	260.50	1536	$0.6784 \times 100\% = 68\%$
Struktur Birokrasi	1874	7	267.71	2688	$0.6972 \times 100\% = 70\%$

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Ketrangan

- **Rata-rata** = Jumlah skor aktual perindikator : Item pernyataan perindikator
- **Skor ideal perindikator** = Nilai tertinggi dari pilhan jawaban x jumlah responden x jumlah item pernyataan
- **Prosentase** = skor aktual perindikator : skor ideal perindikator x 100%

Sumber : hasil pengolahan data 2015

Berdasarkan skor keseluruhan hasil penelitian serta hasil perhitungan tiap-tiap indikator implementasi kebijakan publik yang telah diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan BAIK. Padahal sebelumnya dalam identifikasi masalah terdapat banyak masalah yang peneliti temui pada saat melakukan observasi. Hal ini mungkin terjadi karena keterbatasan yang dimiliki peneliti pada saat melakukan observasi awal. Pada tahap observasi awal peneliti hanya mengobservasi di sekitar lingkungan tempat tinggal belum se Kecamatan Labuan. Selain itu, pada saat melakukan observasi peneliti kurang mendalam mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari responden mengenai implementasi program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Dari hasil kuesioner berdasarkan teori Edward III, penulis masih menemukan beberapa masalah yang menyebabkan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) belum mencapai nilai yang optimal. Adapun permasalahan tersebut antara lain : *pertama*, Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kecamatan Labuan mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kedua, Penerima dana BSM belum mengetahui tujuan dari program dana BSM yang menyebabkan uang yang diterima oleh setiap masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan rumah orang tua siswa seperti untuk membeli kebutuhan yang tidak urgen misalnya handphone, pulsa atau membeli barang lainnya yang tidak menjawab kebutuhan riil para siswa miskin. Untuk itu, diharapkan agar BSM yang disalurkan kepada para siswa hendaknya dapat membantu meringankan beban orang tua dan pendidikan anak-anak sekolah. Maka, orang tua dan guru juga perlu mengontrol keuangan yang diterima oleh siswa.

Ketiga, masyarakat miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari program BSM (Bantuan Siswa Miskin). Hal ini disebabkan petugas pelaksana program belum mensosialisasikan mekanisme untuk mendapatkan bantuan BSM kepada masyarakat.

Keempat, sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai program BSM (Bantuan Siswa Miskin) tidak dapat dimengerti oleh orang tua siswa. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan oleh petugas ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima dana BSM tidak dapat di pahami oleh orang tua siswa penerima dana bantuan BSM.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Kelima, belum optimalnya evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap jalannya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan, sehingga menyebabkan masih adanya orang tua siswa miskin belum mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang sehingga belum disalurkan secara merata KPS (Kartu Pelindungan Sosial) tersebut kepada siswa miskin di Kecamatan Labuan dan kekurangan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dibidang pelaksanaan BSM Kabupaten Pandeglang



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Karena berdasarkan hasil uji hipotesis sebesar 64.75 persen melebihi angka yang penulis hipotesiskan yaitu sebesar 60 persen.

Hasil tersebut belum mencapai nilai optimal, dikarenakan penulis masih menemukan beberapa pertanyaan dalam indikator implementasi kebijakan yang dirasa belum mencapai maksimal. Titik lemah dari indikator Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Pandeglang. *Kedua*, penerima dana BSM belum mengetahui tujuan dari program dana BSM yang menyebabkan uang yang diterima oleh

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

setiap siswa tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya melainkan untuk keperluan untuk memenuhi kebutuhan rumah orang tua siswa. *Ketiga*, masyarakat miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari program BSM (Bantuan Siswa Miskin). *Keempat*, sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai program BSM (Bantuan Siswa Miskin) tidak dapat dimengerti oleh orang tua siswa. *Kelima*, belum optimalnya evaluasi yang dilakukan oleh petugas terhadap jalannya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan, sehingga menyebabkan masih adanya orang tua siswa miskin belum mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BSM khususnya dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program BSM-SD di UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sebagai berikut :

1. Sosialisasi pemerintah mengenai kebijakan program BSM seharusnya lebih ditingkatkan lagi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan perlu melakukan pengawasan serta meningkatkan kesadaran orang tua dan siswa agar tidak menyalahgunakan dana BSM sehingga dana BSM benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan sekolah.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

3. Pelaksana BSM harus menyebarkan informasi mengenai mekanisme Penetapan Sasaran Berbasis Rumah Tangga, melalui pemberian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu BSM, sehingga orang tua siswa yang belum menikmati program BSM bisa mendapatkan bantuan dari program tersebut.
4. Pelaksanaan sosialisasi harus oleh orang yang mempunyai keahlian, komitmen dan keterampilan yang tinggi sehingga materi yang disampaikan harus harus jelas dan detail sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
5. Pemerintah Kabupaten Pandeglang hendaknya menambah jumlah tenaga kerja yang melakukan pengawasan terhadap jalannya program serta mempunyai keahlian dibidang pelaksanaan BSM Kabupaten Pandeglang.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustiono, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bugin, Burhan. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta
- Dunn, Willam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta :PustakaCakra.
- Fahriani, Isni. 2006. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Imam Gozolidaniksan. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahaga, *Ekonomi Rakyat Miskin*. Jakarta. 2009
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metodologi penelitian Sosial*. Bandung ;Refika Aditama
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung :Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*: Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara: Edisi Ke Satu*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wicaksono, Kritisan Widya. 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/ seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisa Proses Analisis Kebijakan publik. Edisi Ke-1.* Malang Bayumeda Publishing.

B. Dokumen

Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia* . BPS, Jakarta. 2011

Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Banten. *Bantendalamangkata h un 2013*

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan

Panduan pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBNP, Jakarta :Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. 2013



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

KUESIONER

Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) DI UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang

A. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pertanyaan satu-persatu
2. Isilah pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sesuai, dengan cara melingkari atau menyilang.
3. Untuk pertanyaan yang dilengkapi isian, isilah titik-titik yang tersedia sesuai dengan pendapat anda.
4. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami, tanyakan langsung kepada peneliti.
5. Atas kesediaan Anda membantu peneliti dalam mengisi kuesioner ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :

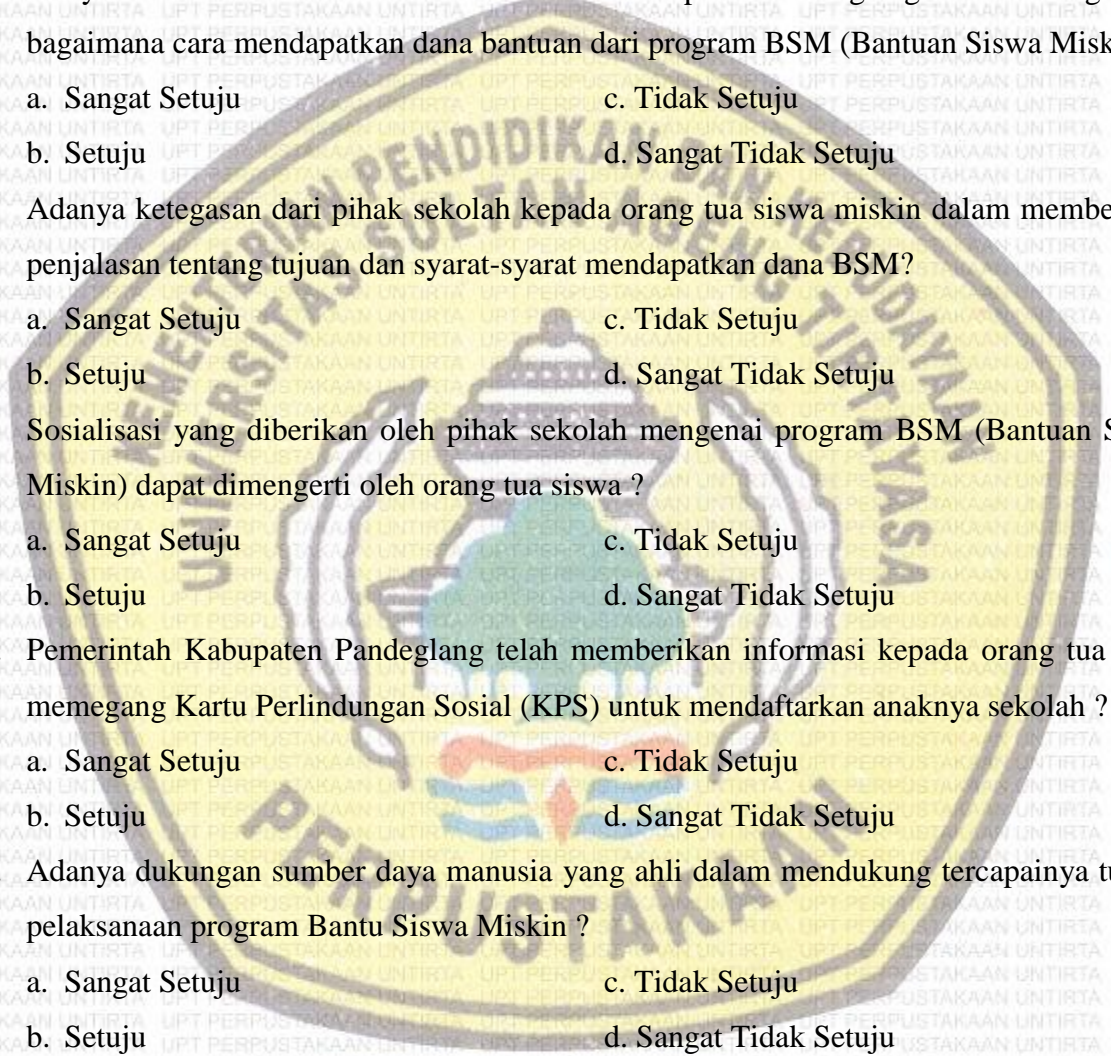
C. DAFTAR PERNYATAAN

1. Pemerintah Kabupetan Pandeglang telah melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kabupaten Pandeglang ?
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

- 
2. Bapak/ibu sudah mengetahui tujuan pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh pemerintah ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
3. Masyarakat miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana bantuan dari program BSM (Bantuan Siswa Miskin) ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
4. Adanya ketegasan dari pihak sekolah kepada orang tua siswa miskin dalam memberikan penjelasan tentang tujuan dan syarat-syarat mendapatkan dana BSM?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
5. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai program BSM (Bantuan Siswa Miskin) dapat dimengerti oleh orang tua siswa ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
6. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan informasi kepada orang tua yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mendaftarkan anaknya sekolah ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
7. Adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dalam mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan program Bantu Siswa Miskin ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
8. Jumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kecamatan Labuan sudah mencukupi ?
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

9. Petugas pelaksana program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah di Kecamatan Labuanmampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

10. Tersedianya fasilitas dalam menunjang pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kecamatan Labuan?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

11. Pelaksanaan program BSM telah dapat memecahkan permasalahan pendidikan di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

12. Telah disediakan tempat untuk pengaduan keluhan dari masyarakat mengenai program BSM?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

13. Aparatur/petugas BSM dalam hal ini pegawai Kantor Pos sebagai tempat penyaluran dana BSM telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat penerima manfaat dana BSM di Kecamatan Labuan ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

14. Kepala sekolah dan komite sekolah selalu tanggap terhadap keluhan masyarakat miskin di Kecamatan Labuan?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

15. Masyarakat menerima dana Bantuan Siswa Miskin sebesar Rp. 450.000 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

16. Program BSM telah dapat membantu meringankan beban orang tua siswa miskin di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

17. Jumlah dana yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan siswa miskin?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

18. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)mampu meringankan masyarakat miskin di Kecamatan Labuan?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

19. Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sering melakukan evaluasi secara rutin terhadap masyarakat yang menerima bantuan BSM ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

20. Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan sudah melaksanakan tugas nya dengan sebaik-baiknya?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

21. Bapak/ibu selalu mendapatkan pelayanan yang baik pada saat penyaluran dana BSM ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

22. Adanya Pembagian kerja yang jelas petugas pelaksana program BSM di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

23. Pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Labuan selalu melakukan monitoring secara berkala demi tercapainya tujuan BSM?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

24. Kepala sekolah dan komite sekolah memberikan informasi mengenai penggunaan dana BSM kepada penerima manfaat program?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

25. Petugas BSM memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai tujuan BSM?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

26. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah memberikan dana BSM kepada siswa yang ekonomi orang tuanya miskin?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

27. Bapak/ibu Menerima dana BSM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dua kali dalam semester?

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.

MATRIK TABULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN

No	Hasil Jawaban Responden atas Item pertanyaan																			skor total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	1	2	1	1	1	2	2	3	1	3	3	3	1	3	3	3	2	2	1	38
2	1	1	2	1	1	4	3	4	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	46
3	1	2	2	2	2	2	3	3	1	2	4	3	1	3	1	3	1	3	3	42
4	2	2	1	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3	1	2	3	2	3	3	47
5	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	1	1	1	2	3	1	3	3	42
6	2	2	2	1	1	3	1	4	1	3	3	1	2	2	2	3	2	3	3	41
7	2	2	2	2	1	2	1	4	1	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	43
8	3	1	1	1	1	3	1	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	43
9	2	2	2	2	2	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	48
10	3	2	2	2	2	4	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	2	3	3	51
11	2	2	2	2	2	4	3	3	1	4	4	3	2	3	3	4	2	3	3	52
12	2	2	2	2	3	4	3	4	1	3	3	3	2	2	3	4	2	3	3	51
13	3	2	3	2	2	4	3	4	4	2	2	3	2	2	3	3	2	1	3	50
14	2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	1	3	47
15	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	1	2	2	3	3	1	2	2	44
16	2	2	1	2	2	4	3	3	3	1	3	2	2	3	3	3	3	1	3	46
17	2	2	1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	2	2	3	51
18	2	2	1	2	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	1	3	49
19	2	2	3	2	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	2	3	49
20	3	2	2	2	1	4	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	48
21	2	2	3	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3	44
22	1	1	2	3	1	4	3	2	2	3	3	3	2	3	1	2	2	1	1	40
23	2	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3	3	2	46

24	2	2	1	3	1	4	3	3	3	2	3	2	2	3	1	2	3	3	2	45
25	1	1	2	2	3	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	3	1	36
26	2	2	2	2	1	3	3	2	1	3	2	3	2	2	2	3	2	3	3	43
27	2	2	2	2	3	2	1	2	1	1	3	3	1	1	2	3	2	3	2	38
28	1	2	1	2	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	46
29	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	2	47
30	3	2	2	2	1	3	3	4	3	3	3	1	2	2	3	3	2	3	3	48
31	3	2	3	2	1	4	3	4	3	3	3	1	2	2	3	4	2	3	2	50
32	3	2	3	2	1	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	51
33	3	2	2	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	45
34	3	2	3	3	3	2	1	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	49
35	1	1	2	2	1	2	2	2	3	1	1	2	2	3	2	2	3	2	2	36
36	2	2	3	3	2	4	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	4	2	3	50
37	1	1	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2	3	1	1	4	36
38	3	2	3	3	2	4	2	4	3	3	3	4	2	3	1	4	1	1	2	50
39	1	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	1	1	3	46
40	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	1	2	2	4	2	2	3	50
41	3	2	1	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	51
42	2	1	1	2	2	3	2	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	51
43	3	2	3	2	2	4	3	3	3	3	4	3	2	4	3	4	2	3	4	57
44	2	2	3	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	59
45	2	1	3	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	54
46	2	1	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	2	4	4	3	4	1	2	50
47	2	1	3	3	1	3	3	4	3	2	2	3	2	4	4	3	2	3	2	50
48	2	1	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	53
49	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	2	4	4	3	3	3	2	54
50	2	2	2	2	3	1	3	2	3	2	2	4	2	3	3	4	3	3	3	49
51	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	3	4	2	3	4	4	3	3	1	54
52	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	1	4	4	3	4	53
53	3	3	3	2	2	4	2	4	3	3	4	3	2	3	3	3	2	4	3	56
54	3	3	1	2	2	3	3	2	3	3	1	3	3	3	4	3	3	3	3	51

55	3	2	1	2	2	3	3	2	3	3	1	3	3	4	4	3	3	4	4	53
56	3	2	2	2	2	4	2	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	54
57	3	2	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	59
58	3	2	3	2	1	4	3	3	3	2	4	3	2	3	4	3	3	4	3	55
59	1	1	2	2	3	1	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3	2	1	37
60	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	47
61	1	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	1	37
62	3	2	2	2	2	4	2	3	3	3	2	2	2	4	3	4	2	2	3	50
63	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	4	4	3	3	1	58
64	3	2	2	3	3	3	3	4	3	2	4	4	2	4	4	3	2	4	3	58
65	3	2	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	4	4	4	2	4	4	61
66	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	2	3	4	56
67	2	1	2	1	2	3	1	2	3	3	2	1	3	3	2	3	3	3	3	43
68	2	1	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	1	43
69	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	3	2	4	2	3	3	3	39
70	2	2	3	3	1	4	1	2	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	52
71	2	1	2	2	2	1	3	2	3	1	2	2	3	3	4	3	3	2	3	44
72	3	3	2	2	3	4	2	4	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	60
73	2	1	2	2	2	2	3	3	1	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	50
74	2	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	55
75	2	2	2	2	2	3	4	4	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	54
76	2	3	3	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	62
77	2	3	3	3	1	3	4	2	3	3	3	3	2	3	2	4	2	3	2	51
78	2	2	3	2	3	4	3	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	59
79	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	3	3	3	57
80	2	1	1	2	1	4	4	3	3	4	3	3	2	4	3	2	2	3	4	51
81	2	1	1	2	3	4	3	3	1	3	4	3	2	4	4	4	3	4	3	54
82	1	1	2	2	1	2	2	4	3	1	4	3	2	4	3	3	2	1	4	45
83	3	2	2	2	2	2	1	4	3	3	3	3	2	3	3	4	1	3	1	47
84	3	3	3	2	2	4	3	2	2	3	3	3	2	3	4	2	3	4	4	55
85	2	2	2	1	1	3	3	2	2	3	3	2	2	4	4	4	3	4	4	51

86	2	2	3	1	2	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	56
87	2	2	2	2	2	2	4	1	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4	53
88	2	1	1	2	2	2	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	4	3	52
89	2	1	1	2	2	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	51
90	2	2	1	2	1	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	53
91	1	1	2	1	1	2	1	3	1	3	3	4	2	4	3	4	3	1	3	43
92	1	1	2	1	1	3	2	3	3	3	4	4	2	3	3	4	2	3	3	48
93	1	1	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	2	4	47
94	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	1	3	4	57
95	1	2	2	2	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	3	3	3	4	57
96	1	1	2	1	1	2	3	1	2	3	4	3	4	4	4	3	3	1	1	44
Jmlh	203	172	203	204	186	290	260	290	243	258	277	264	223	288	284	306	242	262	269	4724



Statistics

N	Valid	96
	Missing	0
Mean		69.4583
Median		71.0000
Mode		74.00
Std. Deviation		8.70924
Variance		75.851
Minimum		49.00
Maximum		88.00
Sum		6668.00

KEMENTERIAN
UNIVERSITAS

BUDAYA
PERTALYAS

PERPUSTAKAAN

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Item 12	Pearson Correlation	.187*	.229*	-.004	-.138	.161	-.009	.179*	.330**	.369**	.190*	.208*	1	.142	.142	.209*	.105	-.056	.151	-.030	.021	.027	.154	-.124	-.080	-.236*	.013	.151	.170*	
	Sig. (1-tailed)	.034	.013	.486	.091	.059	.467	.041	.001	.000	.032	.021		.084	.084	.020	.154	.294	.071	.385	.421	.397	.067	.115	.218	.010	.450	.071	.049	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 13	Pearson Correlation	.321**	.214*	.118	.006	.322**	.057	.093	.215*	.289**	.056	.216*	.142	1	.035	-.039	-.119	.171*	.032	.184*	.323**	.257**	.167	.045	-.081	-.073	-.003	.106	.536**	
	Sig. (1-tailed)	.001	.018	.127	.478	.001	.290	.183	.018	.002	.294	.017	.084		.367	.354	.124	.047	.380	.037	.001	.006	.052	.330	.216	.239	.490	.153	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 14	Pearson Correlation	.253**	.187*	-.053	-.062	-.126	.002	.068	.296**	.180*	.075	.284**	.142	.035	1	.285**	.080	.124	-.030	.119	.228*	.012	.272**	-.089	-.103	-.021	.295**	.179*	.309**	
	Sig. (1-tailed)	.006	.034	.303	.274	.111	.491	.256	.002	.039	.235	.003	.084	.367		.002	.219	.114	.388	.124	.013	.453	.004	.195	.159	.419	.002	.040	.001	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 15	Pearson Correlation	.005	.065	.108	.082	.056	.006	.058	.187*	.049	-.074	.309**	.209*	-.039	.285**	1	.105	.326**	-.061	-.030	.209*	.090	.278**	-.126	.107	-.	.139	.109	.296**	
	Sig. (1-tailed)	.480	.265	.147	.215	.293	.477	.286	.034	.319	.236	.001	.020	.354	.002		.155	.001	.277	.386	.021	.192	.003	.111	.150	.040	.088	.144	.002	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 16	Pearson Correlation	.131	-.016	-.059	.018	.078	-.122	.404**	.176*	-.085	.106	.160	.105	-.119	.080	.105	1	-.012	-.108	-.	-.103	-.178*	-.049	-.069	.314**	.049	-.108	-.076	.020	
	Sig. (1-tailed)	.102	.438	.285	.430	.225	.117	.000	.043	.207	.153	.060	.154	.124	.219	.155		.454	.148	.006	.158	.041	.319	.253	.001	.319	.147	.232	.422	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 17	Pearson Correlation	.113	.140	.075	.144	.209*	.180*	-.087	.041	.153	-.140	.167	-.056	.171*	.124	.326**	-.012	1	.178*	.425**	.253**	.219*	.069	###	.167	.083	.051	.423**		
	Sig. (1-tailed)	.136	.086	.232	.081	.021	.040	.199	.347	.068	.086	.052	.294	.047	.114	.001	.454		.003	.042	.000	.006	.016	.253	.500	.052	.210	.311	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 18	Pearson Correlation	-.025	-.106	-.146	-.098	-.041	-.040	.135	.202*	.032	.238**	.074	.151	.032	-.030	-.061	-.108	1	.173*	-.115	.140	-.149	.060	.036	-.	-.032	-.067	.029		
	Sig. (1-tailed)	.405	.152	.078	.171	.345	.350	.094	.024	.377	.010	.238	.071	.380	.388	.277	.148		.281**	.003	.046	.133	.087	.073	.279	.365	.040	.377	.257	.389
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 19	Pearson Correlation	-.098	-.091	-.078	.027	-.124	.019	-.105	-.065	.225*	.135	-.012	-.030	.184*	.119	-.030	-.	.178*	.173*	1	.280**	.300**	-.041	.298**	-.	-.117	.073	.123	.291**	
	Sig. (1-tailed)	.171	.190	.224	.399	.115	.425	.154	.265	.014	.094	.452	.385	.037	.124	.386	.006	.042	.046		.003	.001	.344	.002	.005	.129	.240	.117	.002	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 20	Pearson Correlation	.145	-.064	.092	.192*	.106	.070	.054	.045	.110	-.061	.113	.021	.323**	.228*	.209*	-.103	.425**	-.115	.280**	1	.466**	.230*	.397**	-.013	.057	.181*	.115	.653**	
	Sig. (1-tailed)	.080	.266	.185	.030	.151	.250	.302	.332	.144	.279	.136	.421	.001	.013	.021	.158	.000	.133	.003		.000	.012	.000	.450	.290	.039	.132	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 21	Pearson Correlation	.210	.083	.060	.093	.050	.190*	-.083	-.041	.143	.065	.016	.027	.257**	.012	.090	-.178*	.253**	.140	.300**	.466**	1	.120	.304**	-.041	.008	.232*	.150	.596**	
	Sig. (1-tailed)	.020	.210	.282	.184	.316	.032	.211	.347	.082	.266	.437	.397	.006	.453	.192	.041	.006	.087	.001	.000		.121	.001	.347	.468	.012	.072	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 22	Pearson Correlation	.287**	.336**	.202*	.060	.020	.088	.025	.195*	-.014	-.197*	.190*	.154	.167	.272**	.278**	-.049	.219*	-.149	-.041	.230*	.120	1	-.030	###	.143	.168	.187*	.389**	
	Sig. (1-tailed)	.002	.000	.024	.280	.425	.197	.406	.029	.445	.027	.032	.067	.052	.004	.003	.319	.016	.073	.344	.012	.121		.384	.500	.082	.051	.034	.000	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 23	Pearson Correlation	-.036	-.114	.113	.137	-.031	.123	-.095	-.104	.065	.135	-.187*	-.124	.045	-.089	-.126	-.069	.069	.060	.298**	.397**	.304**	-.030	1	.055	.135	.169*	.032	.325**	
	Sig. (1-tailed)	.363	.135	.137	.092	.383	.116	.178	.156	.265	.095	.034	.115	.330	.195	.111	.253	.253	.279	.002	.000	.001	.384		.296	.095	.050	.380	.001	
	N	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Item 24	Pearson Correlation	.101	-.048	.057	-.004	.214*	.087	.231*	-.033	-.083	.135	.171*	-.080	-.081	-.103	.107	.314**	###	.036	-.	-.013	-.041	###	.055	1	.120	.109	-.149	.131	
	Sig. (1-	.164	.321	.292	.483	.018	.199	.012	.373	.211	.094	.048	.218	.216	.159	.150	.001	.500	.365	.005	.450	.347	.500	.296		.123	.146	.074	.102	

HASIL Uji RELIABILITY DENGAN SPSS V. 20

Case Processing Summary

	N	%
Valid	96	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	96	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.677	27

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Prosentse Hasil Perhitungan Perindikator

Indikator	Skor Aktual Perindikator	Item pertanyaan Perindikator	Rata-Rata	Skor Ideal Tiap Indikator	Prosentase
Komunikasi	968	5	193.60	1920	$0.5042 \times 100\% = 50\%$
Sumber Daya	840	3	280.00	1152	$0.7292 \times 100\% = 73\%$
Disposisi	1042	4	260.50	1536	$0.6784 \times 100\% = 68\%$
Struktur Birokrasi	1874	7	267.71	2688	$0.6972 \times 100\% = 70\%$
<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata = Jumlah skor aktual perindikator : Item pernyataan perindikator - Skor ideal perindikator = Nilai tertinggi dari pilhan jawaban x jumlah responden x jumlah item pernyataan - Prosentase = skor aktual perindikator : skor ideal perindikator x 100% 					

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

cum. prob one-tail two-tails	$t_{.50}$ 0.50	$t_{.75}$ 0.25	$t_{.80}$ 0.20	$t_{.85}$ 0.15	$t_{.90}$ 0.10	$t_{.95}$ 0.05	$t_{.975}$ 0.025	$t_{.99}$ 0.01	$t_{.995}$ 0.005	$t_{.999}$ 0.001	$t_{.9995}$ 0.0005
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	ConfidenceLevel										

tTable

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

TABEL r

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,387	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,288
9	0,668	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Foto Pelang Kantor UPT Dinas pendidikan
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang



Foto Kantor UPT Dinas pendidikan
Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang



Foto rumah yang menerima BSM-SD yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan
program BSM-SD.



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Foto rumah yang mendapatkan BSM-SD di Kec.Labuan Kab.Pandeglang



Foto rumah yang mendapatkan BSM-SD di Kec.Labuan Kab.Pandeglang



Foto Pelaksanaan Program BSM-SD di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang



PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

BIODATA PENELITIAN

A. Biodata Mahasiswa

Nama : Srida Supriatna
Umur : 24 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 09 Juli 1990
Agama : Islam
Alamat : Kp. Sumur Kopo, Rt.01 / Rw.07 Desa
Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten
Pandeglang – Banten
No. HP : 083813398889
E-mail : kyt.adnan01@gmail.com

B. Biodata Orang Tua

Nama Ayah : Kosim
Alamat : Kp. Sumur Kopo, Rt.01 / Rw.07 Desa
Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten
Pandeglang – Banten
Nama Ibu : Supriatin
Alamat : Kp. Sumur Kopo, Rt.01 / Rw.07 Desa
Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten
Pandeglang - Banten

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Labuan 6 (2002)
2. MTsN 2 Pandeglang (2005)
3. MAN 1 Pandeglang (2008)
4. FISIP UNTIRTA, Program Studi Ilmu Administrasi Negara (2015)

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Srida Supriatna, dilahirkan di Pandeglang, 9 Juli 1990, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari keluarga pasangan Bapak Kosim dan Ibu Supriatin. Sebelumnya, peneliti menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Labuan 6 dan lulus tahun 2002; pendidikan menengah di MTsN 2 Pandeglang lulus tahun 2005; dan pendidikan menengah atas di MAN 1 Pandeglang dan lulus tahun 2008. Pada tahun 2008, peneliti berhasil terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Padatahun 2015, peneliti berhasil menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik dengan judul: *“Implementasi Program Bantuan siswa Miskin sekolah dasar (BSM-SD) Di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di Kecamatan Labuan)”*.

PERINGATAN !!!

1. Dilarang mengutip sebagian/seluruh karya tulis ini untuk digandakan/diperjualbelikan.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, dan atau tinjauan suatu masalah dengan catatan tidak merugikan Penulis.
3. Dilarang mengumumkan sebagian/seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun.